

**PROBLEMATIKA RENDAHNYA KETERWAKILAN
POLITIK PEREMPUAN
(Studi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat)**



Oleh

Hairurrayan
NIM 18.0.60.3.032

**JURUSAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) MATARAM**

2022

**PROBLEMATIKA RENDAHNYA KETERWAKILAN
POLITIK PEREMPUAN
(Studi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat)**

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram
untuk melengkapi persyaratan untuk mencapai
gelar Sarjana Sosial (S. Sos.)**



**Oleh
Hairurrayan
NIM. 18.0.60.3.032**

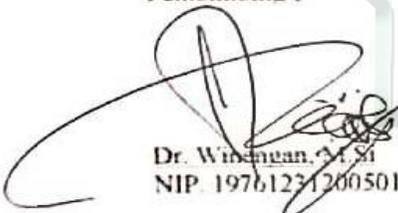
**JURUSAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
MATARAM
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Hairurrayan, NIM, 180603032, dengan judul "Problematika Rendahnya Keterwakilan Politik Perempuan (Studi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat)" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 23-05-2022

Pembimbing I


Dr. Winungan, M. Si
NIP. 197612312005011007

Pembimbing II


Ibnu Murtadho, M. Sos
NIP. 199304162019081001

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, Mei 2022

Hal : Ujian Skripsi

Kepada

Yth Rektor UIN Mataram

Di Mataram

Axsalamu'alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melaksanakan bimbingan, arahan, dan koreksi maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Hairurrayan

NIM : 180603032

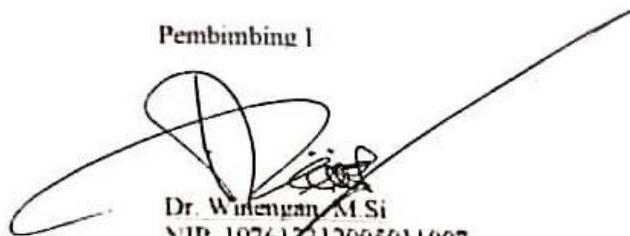
Jurusan/Prodi : Pemikiran Politik Islam

Judul : Problematika Rendahnya Keterwakilan Politik Perempuan (Studi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Sidang *Munawaziyah* Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap skripsi ini dapat segera di-*munawaziyah*-kan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Dr. Wintengan, M.Si
NIP. 197612312005011007

Pembimbing II



Ibnu Murtadho, M. Sos
NIP. 199304162019081001

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Hairurrayan, NIM: 180603032 dengan judul "Problematika Rendahnya Keterwakilan Politik Perempuan (Studi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat)" telah di pertahankan di depan dewan penguji jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram pada tanggal: 06 Juni 2022

Dewan Penguji

Dr. Winengan, M.Si
Ketua Sidang/Pembimbing I

Ibnu Murtadho, M.Sos
Sekretaris Sidang/Pembimbing II

Dr. H. Maimun, S.Ag., M.Pd
(Penguji I)

Saipul Arip Watoni, M.S.I
(Penguji II)

Mengetahui
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

Dr. H. Lukman Hakim, M. Pd
NIP. 196602151997031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

‘Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal’; (al-Hujarat [49]: 13).¹



Perpustakaan UIN Matararam

PERSEMBAHAN

¹ Al-Hujarat [49]: 13

“Tahaddus Bini’matillah kupersembahkan Skripsi ini untuk Almamaterku, guru-guruku, dosen-dosenku, dan dosen pembimbingku yang dengan ikhlas membimbingku dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta kepada kedua orang tua yang sangat saya cintai, berkat keduanya lah saya dapat berada pada tahap ini yaitu menyelesaikan tugas akhir pendidikan strata satu program studi Pemikiran Politik Islam dengan tepat waktu. Terima kasih ananda sampaikan atas segala do’a dan dukungan Ayahku Mujahiddin dan Ibuku Rahmaniah, ananda sangat bersyukur kepada Allah SWT telah menghadirkan orang tua terhebat untuk ananda. Kepada saudari-saudariku, adik pertamaku Humaera dan adik keduaku Zahra terima kasih telah mendukungku dan terus memberikan semangat yang tak ada putusnya selama ini, aku sayang kalian. Yang terakhir ucapan terimakasih saya sampaikan kepada keluarga besar dari Ibuku dan keluarga besar dari ayahku, sertasahabat-sahabatku yang tetap mendoakan serta menyemangatiku dengan ikhlas.”

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Maha suci Allah yang telah memberikan taufik serta hidayah kepada seluruh Makhhluknya, dengan penuh kasih sayang dan limpahan rahmat yang tak terhitung jumlahnya, salah satunya nikmat kesehatan, kesempatan dan kemampuan sehingga apa yang menjadi kewajiban dapat terlaksana atas izin-Nya. Alhamdulillah.

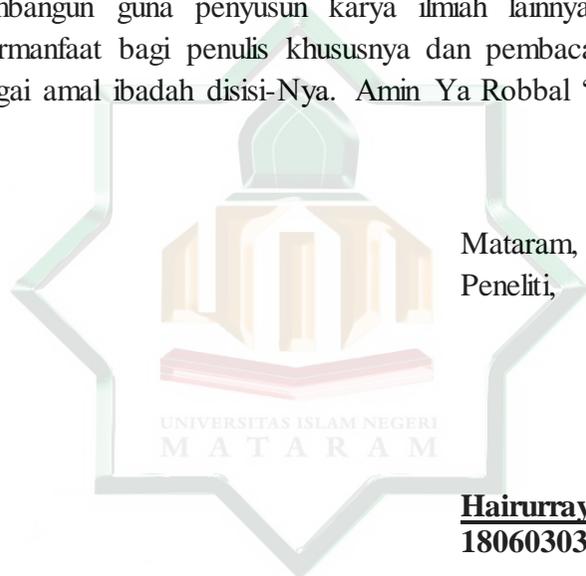
Shalawat serta salam tidak lupa pula tucurahkan kepada pahlawan revolusioner dunia Baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mampu merubah peradaban dunia dari perilaku tercela menuju perilaku terpuji. Begitu ternilai tetesan keringat dan perjuangan Beliau dalam memperjuangkan Islam, sehingga Islam masih dapat dirasakan dengan begitu indah dan akan selalu menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta.

Selama proses penulisan skripsi peneliti menyadari bahwa dalam proses tersebut tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini saya menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Winengan, M.Si. sebagai dosen pembimbing I dan Bapak Ibnu Murtadho, M.Sos sebagai dosen pembimbing II yang meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi;
2. Bapak Dr. H. Maimun, S.Ag., M.Pd. sebagai Dosen Penguji I dan Bapak Saipul Arip Watoni, M.S.I sebagai Dosen Penguji II yang telah memberikan saran konstruktif bagi penyempurnaan skripsi ini;
3. Bapak Zakaria Ansori, M.Hum. sebagai Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam dan bapak Abdul Karim, M.Hum. sebagai Sekretaris Jurusan Pemikiran Politik Islam;
4. Bapak Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama;
5. Bapak Prof. Dr. Masnun Tahir, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram, yang telah memberi tempat bagi penulis untuk men-
ilmu dan memberi bimbingan.
6. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu dan pelajaran berharga. Semoga ilmu yang telah diajarkan menjadi ladang pahala dan bermanfaat bagi penulis di masa mendatang.
7. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Mataram.

8. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan doa, bimbingan dan dukungan sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Teman seperjuangan angkatan 2018 Program Studi Pemikiran Politik Islam UIN Mataram, yang selalu bersama dalam proses belajar, berjuang bersama menghadapi proses perkuliahan UTS dan UAS hingga proses skripsi.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi masih terdapat kesalahan serta kekeliruan baik dalam penulisan maupun dalam penyusunan, karenanya peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyusunan karya ilmiah lainnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca bukunya, serta tercatat sebagai amal ibadah disisi-Nya. Amin Ya Robbal 'alamin.



Perpustakaan UIN Mataram

DARTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teori	10
G. Metodologi Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan.....	24

BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN	25
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	25
B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Keterwakilan Politik Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	30
BAB III PEMBAHASAN	40
A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Keterwakilan Politik Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	40
1. Kepercayaan Sosial	43
2. Norma	44
3. Jaringan Sosial	44
BAB IV PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 29.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Persentase Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi NTB Tahun 2019, 30.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Provinsi Nusa Tenggara Barat, 26.

Gambar 2.2 Kiriman Media Sosial Artikel Tentang Satu-Satunya Perempuan yang Lolos Ke DPRD Provinsi NTB, 41.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Photo Wawancara Bersama calon anggota legislatif perempuan yang tidak terpilih pada pemilihan legislatif tahun 2019 yaitu ibu Hj. Misfalah
- Lampiran 2 Sren Gambar Wawancara Daring Bersama calon anggota legislatif perempuan yang tidak terpilih pada pemilihan legislatif tahun 2019 yaitu ibu Hj. Suryahartin
- Lampiran 3 Photo Wawancara Bersama calon anggota legislatif perempuan yang tidak terpilih pada pemilihan legislatif tahun 2019 yaitu ibu Hj. Nurlaela
- Lampiran 4 Daftar Nama Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Lampiran 5 Rekapitulasi persentase keterwakilan perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD provinsi NTB pada pemilihan umum 2019
- Lampiran 6 Daftar Angket/Kuesioner Penelitian Beserta Rekap Hasil Wawancara
- Lampiran 7 Kartu Konsultasi Pembimbing I
- Lampiran 8 Kartu Konsultasi Pembimbing II
- Lampiran 9 Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negri
- Lampiran 10 Surat Izin Penelitian dari Badan Riset dan Inovasi Daerah
- Lampiran 11 Surat Keterangan Perpustakaan UIN Mataram
- Lampiran 12 Surat Keterangan Turnitin UIN Mataram

**PROBLEMATIKA RENDAHNYA KETERWAKILAN
POLITIK PEREMPUAN
(Studi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat)**

Oleh
Hairurrayvan
18.0.60.3.032

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui problematika rendahnya keterwakilan politik perempuan di DPRD provinsi NTB tahun 2019. Untuk mengkaji hasil dari penelitian ini digunakan teori modal sosial untuk menjawab bagaimana faktor yang menyebabkan rendahnya keterwakilan politik perempuan di DPRD provinsi tahun 2019 secara struktural maupun cultural dan teori perwakilan politik perempuan sebagai teori pendukung atau pelengkap.

Penelitian ini menggunakan pendekatan behavioristik, dengan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer didapatkan dari hasil observasi, wawancara dengan orang-orang yang bersangkutan dalam penelitian sesuai fokus penelitian, dan dokumentasi. Terdapat tiga informan dalam penelitian ini yang tergabung dalam calon anggota legislatif perempuan yang gagal menduduki kursi DPRD Provinsi tahun 2019 yang berasal dari instansi partai PKB yaitu Hj. Nurlaela, partai Demokrat yaitu Hj. Misfalah, dan partai Nasdem yaitu Hj. Suryahartin.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya keterwakilan politik perempuan disebabkan oleh tiga faktor diantaranya: kendala sistem politik yang dihadapi Hj. Suryahartin, sosial budaya yang dihadapi H. Nurlaela, dan ekonomi atau psikologis yang dihadapi Hj. Misfalah menunjukkan bahwa kendala sistem politik yang menjadi penghambat terhadap jalannya calon anggota legislatif perempuan gagal menduduki kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Hal ini dipengaruhi dari beberapa faktor baik dari eksternal maupun internal.

Kata Kunci: *Rendahnyanya Keterwakilan Perempuan, Faktor Penghambat, Pemilu Legislatif.*

**THE PROBLEM OF LOW WOMEN'S POLITICAL
REPRESENTATION
(Study at the Regional House of Representatives of
West Nusa Tenggara Province)**

By

**Hairurrayan
18.0.60.3.032**

ABSTRACT

The writing of this thesis aims to find out the problem of women's political representation in the Provincial DPRD of NTB in 2019. To examine the results of this study, social theory was used to answer how the factors that caused the low political representation of women in the provincial DPRD in 2019 structurally and culturally and the theory of women's political representation as a supporting or complementary theory.

This study uses a behavioral approach, with two data sources, namely primary data sources and secondary data sources. Sources of primary data obtained from observations, interviews with the people concerned in the research according to the research focus, and documentation. There are three informants in this study who are members of the female legislative candidates who failed to occupy the 2019 Provincial DPRD seats from the PKB party agency, namely Hj. Nurlaela, the Democratic party, namely Hj. Misfalah, and the Nasdem party, namely Hj. Suryahartin.

The results of this study indicate that the low political representation of women is caused by three factors including: system constraints faced by Hj. Suryahartin, socio-cultural problems faced by H. Nurlaela, and economics or psychology faced by Hj. Misfalah points out that political system constraints are an obstacle to female legislative candidates who fail to occupy seats as members of the Provincial People's Legislative Assembly. This is influenced by several factors, both external and internal.

Keywords: Low Representation of Women, Inhibiting Factors, Legislative Elections.

مشكلة التمثيل السياسي للمرأة المنخفضة
(دراسة في مجلس النواب الإقليمي لمحافظة نوسا تينجارا الغربية)
بواسطة

هيو راين
18.0.60.3.032

مستخلص البحث

تهدف كتابة هذه الأطروحة إلى معرفة مشاكل التمثيل السياسي المنخفض للمرأة في مقاطعة DPRD التابعة للحواجز غير التعريفية في عام 2019. لفحص نتائج هذه الدراسة ، تم استخدام نظرية رأس المال الاجتماعي للإجابة على كيفية العوامل التي تسببت في التمثيل السياسي المنخفض لـ كانت النساء في جمهورية الكونغو الديمقراطية الإقليمية في عام 2019 هيكلًا وثقافيًا. تستخدم هذه الدراسة نهجًا سلوكيًا ، مع مصدرين للبيانات ، وهما مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية. مصادر البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من الملاحظات والمقابلات مع الأشخاص المعنيين في البحث حسب محور البحث والتوثيق. هناك ثلاثة مخبرين في هذه الدراسة هم أعضاء من المرشحات التشريعيات اللائي فشلن في شغل مقاعد مجلس النواب الإقليمي لعام 2019 من وكالة حزب PKB ، وهي HJ. نورليله الحزب الديموقراطي وتحديدًا هج. المسفلة ، والنسديم أي حج. سورياهارتين. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن التمثيل السياسي المنخفض للمرأة ناتج عن ثلاثة عوامل منها: قيود النظام السياسي التي يواجهها الحاج. سورياهارتين ، والمشاكل الاجتماعية والثقافية التي يواجهها. نورليله ، والاقتصاد أو علم النفس الذي واجهه HJ. ولفت المسفلة إلى أن قيود النظام السياسي التي أعاقت ترشيح المرشحات للتشريعات أخفقت في شغل مقاعد في المجلس التشريعي الشعبي بالمحافظة. يتأثر هذا بعدة عوامل ، خارجية وداخلية.

الكلمات المفتاحية: تدني تمثيل المرأة ، العوامل المثبطة ، الانتخابات الت

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan tentang kesetaraan gender akan tetap menarik untuk diamati, baik skala lokal, nasional maupun internasional. Perempuan yang terlibat dalam ranah perpolitikan di dunia biasanya menemukan kenyataan yang terjadi bahwa dunia politik, publik, budaya serta sosial terkadang tidak dapat bersahabat atau bahkan bisa dikatakan bermusuhan dengan mereka. Masalah ini dapat membuat perempuan yang terlibat di dalam dunia politik ataupun publik tidak sebanyak kaum pria. Mungkin bisa digambarkan bahwa keterwakilan perempuan dalam dunia politik ataupun publik tidak terlalu kondusif.²

Mengingat akan hal ini, kehadiran perempuan di ranah politik praktis dibuktikan dengan keterwakilan perempuan dalam anggota legislatif akan menjadi syarat terciptanya kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan. Tanpa adanya keterwakilan perempuan di ranah legislasi dalam jumlah memadai, kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan akan sulit dibendung. Dengan demikian keterwakilan perempuan tidak dapat diabaikan. Di mana keterlibatan perempuan sebagai agen dalam lembaga perwakilan rakyat untuk mewakili kepentingan dan kebutuhan perempuan harus dapat terwujud dengan baik. Keterikatan dan karakteristik perempuan berdasarkan jenis kelamin menjadi hal yang penting dalam proses penyampaian aspirasi perempuan untuk membuat kebijakan tersendiri.³

Berangkat dalam hal ini, pada Pemilu Legislatif 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan total daerah pemilihan (dapil) yang akan menjadi panggung kontestasi perebutan kursi DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, di mana jumlah dapil Pemilu 2019 yang ditetapkan KPU meningkat dibandingkan jumlah

²Sudarti, K.dan Prasetyaningtyas, P., 2011, "Peningkatan Minat dan Keputusan Berpartisipasi Akseptor KB", *Jurnal Dinamika Manajemen*, Volume 2, 2011, Pages. Hlm. 130-138.

³ Manek, Emiliana.,2015, "Analisis Pengetahuan, Sikap, Keterampilan, Teknik Politik Praktis Perempuan Belu di Kabupaten Belu", Program pascasarjana Universitas Nusa Cendana, Vol. 20, No. 2, hlm. 118-120.

dapil pada Pemilu tahun 2014 lalu. Jumlah dapil itu tidak lepas dari penambahan kursi DPR. Pada Pemilu 2019 ada 575 kursi yang diperebutkan, sedangkan Pemilu 2014 silam kursi di DPR yang diperebutkan sebanyak 560 kursi. Sementara jumlah kursi DPRD provinsi di seluruh Indonesia yakni sebanyak 2.207 kursi, sedangkan pada pemilu 2014 total kursi DPRD yang diperebutkan se-Indonesia adalah 2.112. Adapun jumlah kursi DPRD kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang diperebutkan juga meningkat, yakni dari 17.610 kursi pada Pemilu 2019. Sedangkan pada Pemilu 2014 kursi yang diperebutkan adalah 16.895.⁴

Akan tetapi dari ditetapkannya kursi yang disediakan pada Pemilu legislatif 2019 DPRD provinsi tidak menutup kemungkinan bahwa tingkat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih rendah, terkecuali di provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada Pemilu legislatif 2014 silam mengalami peningkatan, di mana jumlah perempuan yang menjadi anggota legislatif sebanyak 7 perempuan atau hanya 12 persen, sedangkan laki-laki 88 persen atau sebanyak 58 kursi dari 65 kursi di DPRD Provinsi. Sedangkan pada pemilu legislatif tahun 2019 yang berhasil menduduki kursi DPRD provinsi NTT sebanyak 65 orang, 53 diantaranya laki-laki dan 12 perempuan.⁵ Ini merupakan sebuah pencapaian yang patut dihargai, karena DPRD provinsi NTT mampu menunjukkan bahwa faktor budaya patriarki yang menyatakan bahwa politik adalah ruang dan ranahnya laki-laki namun, semua itu tidak menghalangi kaum perempuan di NTT untuk masuk dalam ranah politik untuk mewakili konstituen dari daerah pemilihan masing-masing,⁶ akan tetapi tak terkecuali di Nusa Tenggara Barat.

Dilihat pada periode 2014-2019 lalu, jumlah perempuan di anggota parlemen adalah 14,3 persen atau sebanyak 97 orang, terdapat

⁴ Wiwoho, Bimo, KPU Tetapkan Jumlah Dapil Kursi Pemilu 2019, berita CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180418181605-32-291797/kpu-tetapkan-jumlah-dapil-dan-kursi-pemilu-2019>, [diakses pada 28 Februari 2022, pukul 12.02].

⁵ Data DPRD Provinsi Terpilih 2019-NTT, <https://www.puskapol.ui.ac.id/data-dprd-provinsi-terpilih-2019-ntt>, [diakses 28 Februari 2022, pukul 11.11].

⁶ Jauvanal, Audara, 2018, "Potret Keterwakilan Politik Perempuan", *Jurnal Inada*, Vol. 1, No. 1, hlm. 93

6 orang di DPRD Provinsi NTB dari kaum perempuan. Mereka adalah Hj Baiq Isvie Rupaeda dari partai Golkar Dapil NTB 3, Hj Wartiah dari partai PPP Dapil NTB 2, Hj Nurlaela PKB Dapil NTB 4, Hj Rahmah dari partai Hanura Dapil 5, Hj. Misfalah partai Demokrat Dapil 6 dan Hj Suryahartin partai Nasdem Dapil NTB 3.⁷ Sedangkan pileg 2019 DPRD Provinsi NTB terdapat data di KPU bahwa hasil rekapitulasi dari daftar calon tetap (DCT) sebanyak 914 orang, 563 diantaranya laki-laki dan 351 perempuan atau sebanyak 38,40%.⁸ Namun pada pileg 2019 ini, satu-satunya calon perempuan yang terpilih menduduki kursi DPRD Provinsi yaitu Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH., MH dari Partai Golongan Karya (Golkar), dari total pesaing yang merebut kursi sebanyak 351 orang, beliau terpilih di daerah pemilih (Dapil) NTB 3 total kursi 9 nomer urut 1 yaitu dimana pada wilayah Lombok Timur A (Masbagik, Sukamulia, Selong, Pringgabaya, Aikmel, Sambelia, Pringgasela, Suralaga, wanasaba, Sembalun, Suwela, dan Labuan Haji), dengan jumlah suara 18.634.⁹ Hal ini yang menunjukkan bahwa tingkat keterwakilan politik perempuan pada lembaga legislatif DPRD Provinsi NTB masih rendah.

Rendahnya representasi atau keterwakilan perempuan di DPRD provinsi NTB dalam arti jumlah atau kuantitas, maka gambaran lain yang melengkapinya adalah persoalan kualitas. Pada pileg 2019 ini, caleg perempuan mengakui beratnya persaingan antar partai lain dikarenakan perempuan seringkali dijadikan pelengkap atau penerima kuota 30%, dan mengakui kesulitan saat melawan tangguhnyanya caleg laki-laki di lapangan. Hal itulah yang membuat caleg perempuan lainnya yang merupakan pendatang baru lebih berat untuk bisa terpilih. Sehingga, perempuan mengakui kealahannya dari segi akal dan strategi politik para laki-laki.

⁷ Chusna, Fitria, *Keterwakilan Perempuan di DPR 2019-2024 di Prediksi Paling Tinggi*, <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/26/10465321/keterwakilan-perempuan-di-dpr-2019-2024>, [diakses pada 15 Desember 2021, pukul 23.40].

⁸ *Peta Pencalonan Perempuan di Pemilu Serentak 2019*, Dalam <https://perludem.org/2018/09/26/peta-pencalonan-perempuan-di-pemilu-serentak-2019/>, [diakses 5 Januari 2022, pukul 21.25].

⁹ Yan, *Isvie Satu-Satunya Perempuan Lolos ke DPRD NTB*, <https://radarlombok.co.id/isvie-satu-satunya-perempuanlolos-ke-dprd-ntb.html>, [diakses pada 15 Desember 2021, pukul 23.44].

Kendala lain yang menyebabkan keterwakilan perempuan di ranah politik DPRD provinsi NTB masih rendah dikarenakan masyarakat masih menganggap bahwa dunia politik adalah dunianya laki-laki, di mana sistem dan struktur sosial patriarki telah menempatkan perempuan pada posisi yang tidak sejajar dengan laki-laki, masih sedikitnya perempuan yang terjun ke dunia politik dan rendahnya pengetahuan perempuan tentang politik, serta dukungan partai politik yang belum bersungguh-sungguh terhadap perempuan. Sehingga hal ini mengakibatkan bahwa harapan ini tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah.¹⁰

Selain itu, penyebab utama atas kurangnya keterwakilan perempuan dalam ruang-ruang publik. Disebabkan oleh sumber pendanaan terlihat dari kondisi ekonomi beberapa caleg, sehingga menjadi penghalang apabila harus berhadapan dengan kenyataan harus mengeluarkan biaya yang banyak.¹¹ Maka dalam hal ini, penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai problematika rendahnya keterwakilan politik perempuan di lembaga DPRD Provinsi NTB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas mengenai **PROBLEMATIKA RENDAHNYA KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN** (Studi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat) maka adapun rumusan masalah yang peneliti jadikan sebagai batasan dalam melakukan penelitian ini adalah “Faktor-faktor apakah yang menyebabkan rendahnya keterwakilan politik perempuan di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat?”.

¹⁰ Winengan, Juli 2018, “Kebijakan Demokratisasi Politik Lokal Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Langsung”, *jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 22, No. 1, hlm. 63-65.

¹¹ Farida Hanum, *Kajian dan Dinamika Gender*, (Malang: Intrans Publishing, 2018). Hlm.154.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah sebagaimana yang telah diutarakan oleh penulis di atas. Adapun tujuan penulis ini agar memperoleh gambaran yang jelas dan terhindar dari interpretasi dan meluasnya masalah dalam memahami isi penulis. Tujuan penulis ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya keterwakilan politik perempuan di lembaga DPRD provinsi Nusa Tenggara Barat.

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dilihat dari segi teoritis penulisan ini merupakan kegiatan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya hal-hal yang menyangkut tentang wacana perempuan di lembaga legislatif. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan atau wawasan baru dalam ruang lingkup politik gender dan mengetahui relevansi teori dengan fakta yang sebenarnya, juga diharapkan dapat memberi rangsangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya agar dapat mengembangkan dan melengkapi serta kritik yang membangun bagi penelitian ini dan secara akademis penulis diharapkan mampu memberi sumbangsih kepada UIN Mataram, khususnya pada mahasiswa pemikiran politik islam. Dengan demikian, hasil penelitian dalam kajian ini semakin kaya dan semakin sempurna.

2. Manfaat Praktis

Dalam segi praktisnya diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mengenai peran perempuan di lembaga legislatif. Selain itu manfaat lain adalah memberikan landasan berpikir yang jernih kepada masyarakat agar tidak memandang dunia politik adalah dunianya kaum laki-laki sehingga dapat berguna untuk memberikan sebuah informasi baik kalangan yang akan melakukan penelitian berikutnya.

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

1. Ruang Lingkup

Sistem pemerintahan di Indonesia merupakan sistem demokrasi. Dengan demikian warga negara memiliki kesempatan untuk bersaing memiliki suara, yang artinya kekuasaan berada di tangan rakyat.¹² Maka untuk mendapatkan legitimasi hukum yang sah menjadi anggota legislatif berdasarkan Undang-Undang yang berlaku harus melalui pemilihan umum.¹³ Sehingga perempuan dan politik menjadi suatu yang tidak dapat dipisahkan. Namun faktanya membuktikan bahwa keterwakilan politik perempuan di Nusa Tenggara Barat masih kurang terwakili di lembaga DPRD Provinsi, yang berakibat tidak adanya ruang untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu peneliti akan membatasi masalah sebagai berikut yaitu: apa saja faktor yang mengakibatkan rendahnya keterwakilan politik perempuan di DPRD provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sehingga berbicara ruang lingkup dan setting penelitian maka erat kaitannya dengan batasan-batasan penelitian atau tempat lokasi dimana penelitian dapat mendapatkan informasi yang dijadikan objek penelitian karena dalam melakukan penelitian ini disadari bahwa masih adanya keterbatasan baik aspek ilmu pengetahuan, referensi, waktu, tenaga, maupun dari aspek pendanaan. Oleh karena itu dirasakan perlu membatasi ruang lingkup penelitian.

2. Setting penelitian

Adapun nantinya penelitian ini akan dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

¹² Mochtar Masboed, *Negara, Kapital, dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 15.

¹³ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, Dalam https://jdih.kpu.go.id/data_parpol/AD%20ART%DEMOKRAT%202019.pdf, [diakses pada 23 Desember 2021].

E. Telaah Pustaka

Pada penelitian ini, peneliti telah melakukan penelusuran pustaka yang berkaitan dengan masalah representasi rendahnya keterwakilan politik perempuan. Dengan demikian, yang sedang peneliti kaji akan mengambil beberapa kajian tentang skripsi-skripsi dan jurnal yang mempunyai kemiripan, akan tetapi berbeda dalam titik fokus pembahasannya. Jadi apa yang sedang peneliti kaji saat ini adalah merupakan hal yang baru. Berikut ada beberapa hasil penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah, Harpani Matnuh, Akhmad Rudini Akbar dari Universitas Lambung Mangkurat tentang “Problematika Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Banjarmasin” di mana penulis menjelaskan bahwa penerapan keterwakilan perempuan dalam hasil pemilihan umum tahun 2009 di DPRD Kota Banjarmasin menghasilkan 13 perempuan terpilih sebagai anggota DPRD Kota Banjarmasin dengan persentase keterwakilan perempuan 28,8 persen atau pembulatangannya 29 persen. Masih ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya angka 30% dalam keterwakilan perempuan dengan faktor utama yaitu masih kuatnya calon legislatif dari kalangan laki-laki karena dilihat dari pengalaman dan lebih mempuni.¹⁴
2. Penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Monawarah dari Universitas Tanjungpura Pontianak tentang “Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah (Studi Calon Anggota Legislatif Perempuan Pada Pemilihan Umum Kabupaten Tahun 2014)” menjelaskan mengenai hambatan terhadap keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah di mana budaya patriarki di kalangan masyarakat mengakar dan mendominasi dalam kehidupan, bahkan dalam lingkungan terkecil seperti keluarga nuansa dominasi laki-laki sangat kuat. Dan budaya patriarki memegang peranan dalam pemerintahan politik,

¹⁴ Fatimah, Harpani, Akhmad Rudini Akbar, 2014 “Problematika Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Banjarmasin”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 7.

walaupun sulit diubah namun sedikit demi sedikit telah mengalami pergeseran nilai mengenai kedudukan dan peran kaum perempuan. Sehingga penelitian ini ingin mengetahui faktor penghambat rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sukamara tahun 2014-2019.¹⁵

3. Penelitian yang dilakukan oleh Audara Jovani dari Universitas Kristen Indonesia tentang “Potret Keterwakilan Politik Perempuan Anggota Legislatif di DPRD NTT pada Pemilu 2014” penulis menjelaskan mengenai potret perempuan anggota legislatif di DPRD Provinsi NTT yang terpilih dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 di mana perempuan NTT yang berpartisipasi dalam pemilu 2014 mampu berkontribusi dalam mewujudkan keterwakilan perempuan di dalam partai politik dan parlemen, walaupun dalam perjalanannya banyak menghadapi tantangan, baik internal maupun eksternal. Maka adapun penulis ingin mengetahui bagaimana keterwakilan perempuan NTT di lembaga legislatif.¹⁶
4. Penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa dari Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tentang “Perempuan dan Politik (Studi Perbandingan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan pada Partai Golkar Dan Partai Keadilan Sejahtera Kota Makassar)”. Dimana penulis menjelaskan mengenai minimnya keterwakilan perempuan di lembaga politik formal salah satunya partai politik peserta pemilu 2004 tidak satupun partai politik dalam struktur kepengurusan yang diketuai oleh perempuan, posisi perempuan tertinggi dalam partai politik adalah sebagai sekretaris umum sedangkan dari 38 partai politik peserta pemilu 2009 sedikit adanya peningkatan meskipun tidak begitu signifikan dari 38 partai politik untuk kota Makassar hanya dua partai yang berhasil diketuai oleh perempuan. Selain minimnya

¹⁵ Monawarah, Lailatul, 2017, “Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah (Studi calon Anggota Legislatif perempuan Pada Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tahun 2014)”, *Aspirasi: Jurnal S-1 Ilmu Politik*, <https://jurnafis.untan.ac.id>, Vol. 5, No.2.

¹⁶ Jovani, Audara, 2018, “Potret Keterwakilan Politik Perempuan Anggota Legislatif di DPRD NTT pada Pemilu 2014”, *Jurnal Inada*, Vo.1, No.1.

representatif perempuan dalam kepengurusan partai politik di kota Makassar, satu persoalan lagi yang meminggirkan perempuan dalam proses politik yakni rekrutmen calon legislatif perempuan pada pemilu 2004, pada dasarnya partai politik peserta pemilu 2004 lalu di kota Makassar telah melaksanakan amanah dari undang-undang pemilu no 12 tahun 2003 pasal 65 tentang kuota 30% dalam hal pencalegan. Sebagian besar partai politik telah mencapai angka tersebut bahkan ada beberapa partai politik yang mencalonkan perempuan lebih dari 30%. Hal itulah yang penulis menganggap bahwa partai politik belum sungguh-sungguh dalam memikirkan pentingnya keterwakilan perempuan. Penelitian ini akan berguna untuk peneliti dalam hal membandingkan hasil penelitian ketika turun ke lapangan.¹⁷

5. Jurnal politik Islam, oleh Very Wahyudi dari Universitas Islam Negeri Mataram tentang “Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender”. Dimana penulis menjelaskan jumlah perempuan berpotensi di bidang politik masih sedikit untuk mampu berkompetisi dengan para laki-laki yang selama ini dikonstruksikan untuk lebih maju daripada perempuan. Sehingga perempuan untuk memasuki wilayah publik ini memang sudah meningkat, akan tetapi persentasenya masih rendah meskipun dijamin oleh ketentuan Undang-Undang. Adapun kendala perempuan secara ideologis dan psikologis yang akan dihadapi ketika akan masuk di bidang politik adalah pertama adanya ideologi gender dan pola-pola cultural maupun peran sosial yang ditetapkan sebelumnya diberikan kepada perempuan dan laki-laki. Kedua, kurangnya kepercayaan diri perempuan untuk mencalonkan diri. Maka di sini penulis ingin meneliti bagaimana peran politik perempuan dalam dinamika perpolitikan Indonesia selama ini.¹⁸

¹⁷ Khaerunnisa, “Perempuan dan Politik (Studi Perbandingan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Pada Partai Golkar Dan Partai Keadilan Sejahtera Kota Makassar)”, (*Skripsi*, Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik).

¹⁸ Wahyudi, Very., 2018, “Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender”, *Politea: Jurnal Politik Islam*, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea>, Vol. 1, No. 1, hlm. 63-83.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Totok Inwanto dari Universitas Diponegoro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tentang “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Rendahnya Tingkat Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Mojokerto 2014”. Penulis menjelaskan bahwa partisipasi politik perempuan merupakan suatu hal yang penting demi terciptanya kesetaraan gender di bidang politik, keterlibatan perempuan di kehidupan publik telah meningkat namun sayangnya partisipasi dan keterwakilan mereka di lembaga legislatif tingkat nasional maupun provinsi masih rendah. Rendahnya tingkat partisipasi politik perempuan di Kabupaten Mojokerto secara garis besar dikarenakan adanya budaya patriarki dan rendahnya kualitas perempuan dibidang politik, sosial, serta ekonomi. Dikarenakan banyak kaum perempuan belum terlalu memahami dunia politik, mereka terjun di dunia politik tanpa bekal yang memadai, hal itu yang kemudian menjadikan kualitas perempuan masih rendah.¹⁹

Berbeda dengan ke 6 (enam) penelitian di atas, penelitian ini akan berfokus pada problematika rendahnya keterwakilan politik perempuan (studi di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat).

F. Kerangka Teori

Untuk menganalisis hasil penelitian, peneliti menggunakan teori Modal Sosial dan teori perwakilan politik perempuan sebagai teori pendukung yang dipergunakan dalam penelitian ini.

1. Teori Modal Sosial

Modal sosial adalah sebagai salah satu komponen umum dalam menggerakkan kebersamaan, mobilitas ide, kesaling percaya dan kesaling menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama. Teori modal sosial ini terutama berakar pada gagasan kepercayaan, norma, dan jaringan informal.²⁰

¹⁹Inwanto, Totok, “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Rendahnya Tingkat Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Mojokerto 2014”, salah <https://www.fisip.undip.ac.id>, [diakses pada 6 Januari 2022, pukul 07.51] .

²⁰Dwiningrum, Siti Irene Astuti, 2014, *Modal Sosial dalam Pengembangan Pendidikan dalam Perspektif Teori dan Praktik*, Yogyakarta: UNY Press, hlm. 1

Adapun dalam teori modal sosial ini memiliki tiga (3) konsep yaitu kepercayaan (*trust*), norma, dan jaringan (*network*) adalah konsep-konsep inti dalam modal sosial.²¹

1. Kepercayaan (*Trust*)

Rasa percaya adalah dasar dari perilaku moral yang di mana modal sosial dibangun. Moralitas menyediakan arahan bagi kerjasama dan koordinasi sosial dari semua aktivitas sehingga manusia dapat hidup bersama dan berinteraksi satu dengan lainnya. Rasa saling mempercayai yang tinggi akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai ragam bentuk dan dimensi terutama dalam konteks membangun kemajuan bersama. Fukuyama mendefinisikan kepercayaan (*trust*) sebagai sikap saling mempercayai di dalam masyarakat yang memungkinkan masyarakat tersebut saling bersatu dengan yang lain dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial. Dakhli dan De Clereg membedakan kepercayaan menjadi dua yaitu:

a. *General Trust*

Kepercayaan umum merupakan kepercayaan seseorang terhadap individu atau orang lainnya. Kepercayaan tersebut disebut dengan kepercayaan asertif (percaya karena percaya saja). Misalnya, ketika orang Jawa di New York karena persamaan etnis maka kedua orang ini akan saling percaya satu sama lain.

b. *Institutional Trust*

Kepercayaan institusional merupakan kepercayaan seseorang terhadap suatu organisasi atau institusi. Kepercayaan tersebut dilihat dari segi seseorang mempercayai suatu organisasi karena integritas dari organisasi tersebut.

²¹Syakra, Rusydi, 2003, "Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi", *jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 5, No. 1, hlm. 4-6.

2. Norma

Norma sosial akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Pengertian norma di sini adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dapat dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Di mana dalam perusahaan, tertulis maupun tidak tertulis secara tidak langsung sebuah norma pasti terbentuk. Konfigurasi norma yang tumbuh di dalam organisasi juga akan menentukan apakah norma akan memperkuat kerekatan hubungan antara individu dan memberikan dampak positif dalam organisasi tersebut.

3. Jaringan

Jaringan sosial sebagai hubungan-hubungan yang tercipta antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Hubungan-hubungan antar individu dalam suatu kelompok juga disebut suatu jaringan. Kelompok yang dimaksud dimulai dari yang terkecil yaitu; keluarga, kelompok, kekerabatan, komunitas tetangga, kelompok-kelompok asosiasi, organisasi formal dan bentuk-bentuk lainnya. Hubungan-hubungan yang terjadi bisa dalam bentuk formal maupun informal.

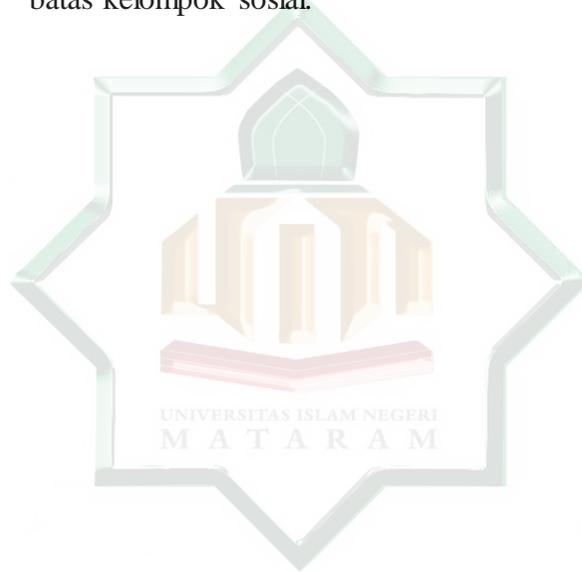
Granovetter membedakan modal sosial berdasarkan kekuatan dari sebuah ikatan sosial yaitu:

a. *Strong Ties*

Ikatan yang kuat merupakan ikatan yang mengikat dan bersifat terus menerus pada setiap kelompok. Ikatan yang kuat ini dapat dikatakan seperti ikatan yang ada di dalam sebuah kelompok teman dekat. Ikatan yang kuat memberikan motivasi yang lebih besar kepada seseorang untuk saling memberikan bantuan karena ikatan tersebut membuat solidaritas antar sesama semakin besar. Karena semakin kuat ikatan antara dua orang maka semakin besar tingkat tumpang tindih dalam lingkaran kelompok sosial mereka.

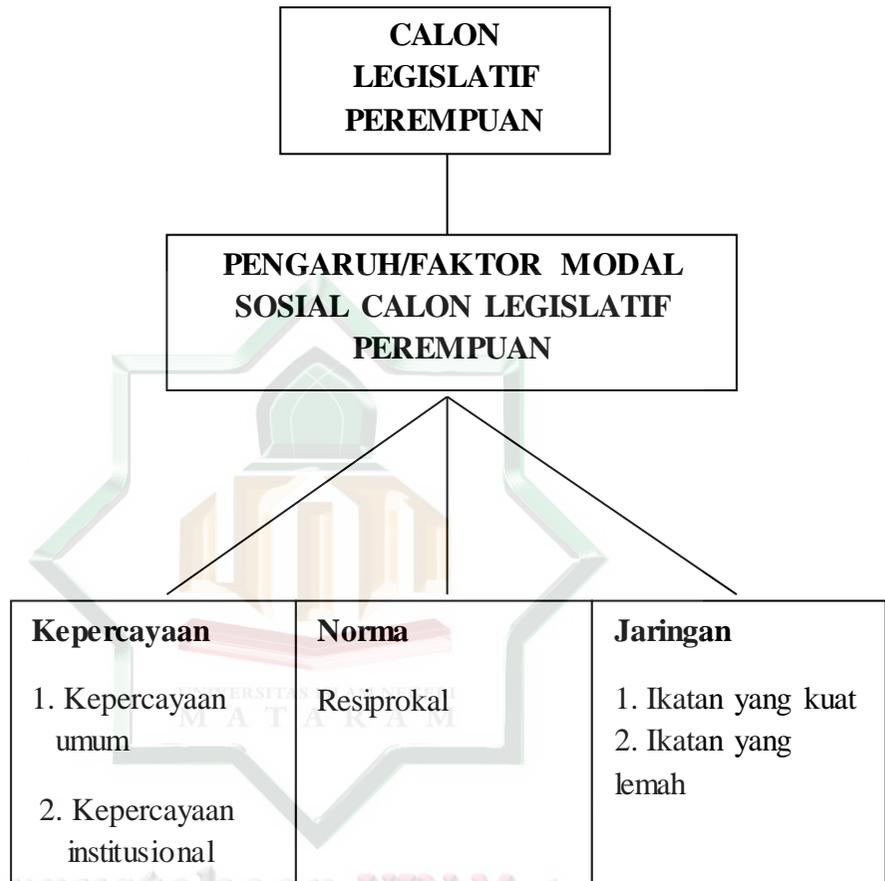
b. *Weak Ties*

Ikatan yang lemah merupakan ikatan yang tidak meningkat dan bersifat sementara. Ikatan yang lemah ini terjadi di antara kelompok yang berbeda seperti hubungan dengan teman-teman dari lingkungan sosial yang berbeda. Hal ini bisa disebabkan oleh perbedaan etnis atau perbedaan ras. Ikatan yang lemah dapat menjadi jembatan sosial karena ikatan ini dapat menjadi penghubung ke lingkungan sosial yang berbeda-beda di mana dapat menyeberangi batas-batas kelompok sosial.



Perpustakaan UIN Mataram

Kerangka teori modal sosial



Teori modal sosial ini akan dipergunakan dalam analisis temuan data yang didapatkan setelah melakukan penelitian tentang faktor yang menyebabkan rendahnya keterwakilan calon anggota legislatif perempuan di DPRD provinsi pada pemilihan umum tahun 2019, di mana peneliti mencari tahu pengaruh atau faktor modal sosial terhadap calon anggota legislatif perempuan. Penelitian ini akan memakai dimensi sosial yang meliputi (1) Kepercayaan yang terbagi menjadi dua yaitu kepercayaan umum dan kepercayaan institusional, (2) Norma Resiprokal dan (3)

Jaringan yang dilihat dari kekuatan ikatannya yang terbagi menjadi ikatan yang kuat dan ikatan yang lemah.

2. Perwakilan Politik Perempuan

Teori perwakilan politik adalah di mana para wakil mempunyai dorongan untuk mewakili kepentingan mereka di masa depan meskipun mereka sendiri tidak ambil bagian dalam kepentingan itu. Adapun dalam perwakilan politik perempuan menurut Lovenduski membaginya menjadi dua bentuk:²²

a. Perwakilan Deskriptif

Perwakilan deskriptif adalah tuntutan bahwa kaum perempuan seharusnya berada dalam pembuatan keputusan sebanding dengan keanggotaan mereka dalam penduduk merupakan tuntutan atas perwakilan deskriptif (kadang-kadang disebut perwakilan proposional, penggambaran, mikrokosmik).

b. Perwakilan Substantif

Konsep perwakilan substantif menyoroti isi dari keputusan-keputusan para wakil. Perwakilan substantif dari suatu kelompok secara paling sederhana dilukiskan sebagai perwakilan kepentingan-kepentingannya. Adapun tiga macam argumen yang diajukan untuk mendukung tuntutan atas perwakilan perempuan diantaranya;

1. Argumen keadilan

Argumen yang paling kuat untuk mendukung bertambahnya perwakilan perempuan adalah argumen yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan. Argumen tersebut menyatakan bahwa sangatlah tidak adil jika kaum laki-laki memonopoli perwakilan, terutama di suatu negara yang menganggap diri sebagai Negara demokrasi modern.

²² Joni Lovenduski, 2005, *State Feminism and Political Representation*, (New York: Cambridge University Press), hlm. 36-45.

2. Argumen Pragmatis

Argumen pragmatis memanfaatkan gagasan mengenai para politisi rasional yang memaksimalkan jumlah suara. Hal ini didasarkan pada keuntungan-keuntungan partai politik untuk meningkatkan jumlah wakil perempuan mereka.

3. Argumen perbedaan

Kumpulan argumen ketiga didasarkan pada konsep-konsep perbedaan. Argumen pokoknya adalah bahwa perempuan akan membawa gaya dan pendekatan yang berbeda dalam politik yang akan mengubahnya menjadi lebih baik, suatu pengaruh yang menguntungkan semua pihak.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah ilmu tentang suatu kerangka kerja untuk melaksanakan penelitian yang bersistem, sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu, studi atau analisis teori mengenai suatu cara atau suatu metode yang berkaitan dengan prinsip umum pembukaan pengetahuan.²³ Metode penelitian ini diperlukan untuk memberikan pedoman tentang cara-cara seorang peneliti dalam mempelajari, menganalisis dan memahami suatu penelitian yang dilakukan. Untuk itulah penyusunan penelitian dengan judul **PROBLEMATIKA RENDAHNYA KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN (Studi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat)** menggunakan suatu metode yang dijabarkan dalam metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah pendekatan behavioristik yang di mana pendekatan penelitian ini akan menggambarkan secara komprehensif untuk mengetahui dan menganalisis tingkah laku manusia. Munculnya perilaku pasangan calon legislatif perempuan tahun 2019 disebabkan oleh adanya

²³ Nor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2011), hlm.22.

faktor lain yang mempengaruhi rendahnya keterwakilan politik perempuan di DPRD Provinsi NTB.

2. Kehadiran Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Field Research* (penelitian lapangan) yaitu dimana penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mengumpulkan data atau masalah dari penelitian tersebut.²⁴ Sesuai dengan jenis yang peneliti ambil yaitu penelitian kualitatif, dimana peneliti melihat adanya permasalahan pada pileg tahun 2019 yang dalam hal ini adalah problematika rendahnya keterwakilan politik perempuan di lembaga DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sehingga dalam penelitian kualitatif ini peran peneliti adalah sebagai instrument kunci dalam mengumpulkan data, analisis data, dan pelaporan. Oleh karena itu, peneliti mutlak adanya dilapangan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana objek penelitian dapat ditemukan. Lokasi penelitian ini akan bertempat di provinsi NTB dengan alasan bahwa keterwakilan politik perempuan di lembaga DPRD provinsi NTB masih rendah, karena mengingat yang berhasil menduduki kursi DPRD hanya satu yaitu Baiq Isvie Rupaeda dari total yang merebut kursi sebanyak 351 caleg perempuan.

4. Sumber dan Jenis Data

1. Pengertian data

Data diartikan sebagai suatu fakta yang dapat digambarkan dengan angka, simbol, kode dan lain-lain. Menurut Suharsimi Arikunto data diartikan sebagai hasil pencatatan peneliti baik berupa fakta maupun angka. Sedangkan menurut Soeranto dan Arsyad data adalah semua hasil observasi atau pengukuran yang telah dicatat untuk suatu keperluan tertentu.

²⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 24.

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer dari penelitian ini akan didapatkan dari hasil keterangan narasumber yang dihubungi pada waktu wawancara para sumber data. Yang menjadi sumber penelitian ini adalah di DPRD provinsi yang lokasinya berada di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjuk dari sumber pertama dan dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam dokumen-dokumen.²⁵ Selain itu data sekunder menurut Bungin adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa data-data yang berasal dari artikel dan karya ilmiah yang dipublikasikan di internet maupun di perpustakaan serta literatur lainnya yang berkaitan. Berdasarkan dari keterangan tersebut yang menjadi data skunder dalam penelitian ini, yaitu buku-buku terkait dengan masalah yang akan diteliti, jurnal, dan artikel atau internet yang akan mendukung keaslian data yang akan didapatkan pada penelitian ini.

Data yang akan dicari adalah kenapa rendahnya partisipasi politik perempuan di lembaga DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

c. Jenis data

Jenis data yang gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, dimana data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud pernyataan variabel dan bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data minalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus atau observasi yang telah digunakan dalam catatan lapangan.

²⁵ Sumdi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987) hlm.93.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan atau tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti suatu perkaranya.²⁶

Maka dalam penelitian ini, di mana setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan instrumen analisis data kualitatif deskriptif. Dengan pengertian bahwa data yang dipakai tidak mempergunakan perhitungan angka, melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan berupa hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi dengan beberapa orang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan sebuah langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, yang tanpa mengetahui teknik pengumpulan data. Maka penelitian tidak akan mendapatkan data. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diinginkan. Dalam penelitian ini data yang diperoleh menggunakan 3 teknik yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah cara menghimbau bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi tanpa partisipasi, yaitu mengadakan observasi tanpa ikut kedalam kehidupan responden.²⁷

²⁶Djam'an Satorik dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm.103.

²⁷ Budiarto, Eko, Skm,dkk, *Pengantar Epidemiologi*, (Jakarta:Kedokteran EGC, 2003), hlm.45

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden, dengan cara bercakap-cakap dengan lentur dan terbuka serta tidak terstruktur ketat dalam suasana formal dan tatap muka. Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara atau dengan tanya jawab secara langsung.²⁸

Teknik wawancara ini akan dilakukan dengan menggunakan wawancara semi terstruktur. Artinya dimana melakukan tanya jawab secara langsung kepada subjek penelitian, guna untuk pengumpulan data primer dengan mengacu kepada suatu panduan wawancara yang sudah dipersiapkan sebelumnya agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian yang membahas tentang faktor-faktor rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Adapun target dari wawancara peneliti ini melakukan teknik penunjukkan dimana peneliti menunjuk secara langsung nama-nama yang akan diwawancarai, diantaranya Hj. Nurlaela partai PKB Dapil NTB VI, Hj. Misfalah dari partai Demokrat Dapil NTB VI, dan Hj. Suryahartin dari partai Nasdem Dapil NTB 3. Ketiga (3) kaum perempuan yang gagal di pileg tahun 2019 akan peneliti wawancarai dengan alasan karena para calon legislatif perempuan ini merupakan perempuan yang incumbent atau pernah menduduki kursi DPRD provinsi NTB periode 2014-2019 akan tetapi mencalonkan diri lagi pada pileg 2019 namun kalah dalam pemilihannya, maka dari itu peneliti mencoba melihat situasi ini sebagai bentuk untuk menjawab faktor rendahnya keterwakilan pasangan calon legislatif perempuan di DPRD provinsi NTB.

²⁸ Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 131

c. Dokumentasi

Dalam dokumentasi ini merupakan salah satu metode pengumpulan data yang didapat dari hasil survei di KPU, Bawaslu, serta DPRD provinsi NTB, di mana dalam penelitian ini terdapat hasil rekapitulasi DCT di DPRD provinsi NTB tahun 2019 sebanyak 351 caleg perempuan yang dipergunakan dalam metodologi penelitian sosial. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi seperti dokumen, artikel dan buku-buku untuk menambah refrensi data.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, katagori, dan suatu aturan dasar, dikarenakan data tersebut masih bersifat bertebaran, sehingga peneliti diwajibkan untuk mengklarifikasikan kedalam katagori tertentu untuk mendapatkan pemaknaan terhadap data.²⁹

Dalam mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil obeservasi, wawancara, serta dokumentasi maka penulis menggunakan analisis yang ditampilkan secara deskriptif berupa ungkapan-ungkapan atau kalimat-kalimat yang ada untuk mendapatkan kesimpulan yang jelas dan rinci. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman sebagai berikut:³⁰

1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan dalam hal-hal yang penting, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Maka dalam penelitian ini peneliti mereduksi data dengan memilih data-data hasil observasi, wawancara dan mengelompokkan berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang diungkap di lapangan.

²⁹ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 196.

³⁰ Sugiyoni, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2012), hlm 91-95

2. *Display* (Penyajian Data)

Setelah melakukan reduksi data maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data dan mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori. Maka dalam penelitian kualitatif ini dalam penyajian data digunakan berupa teks yang bersifat naratif.

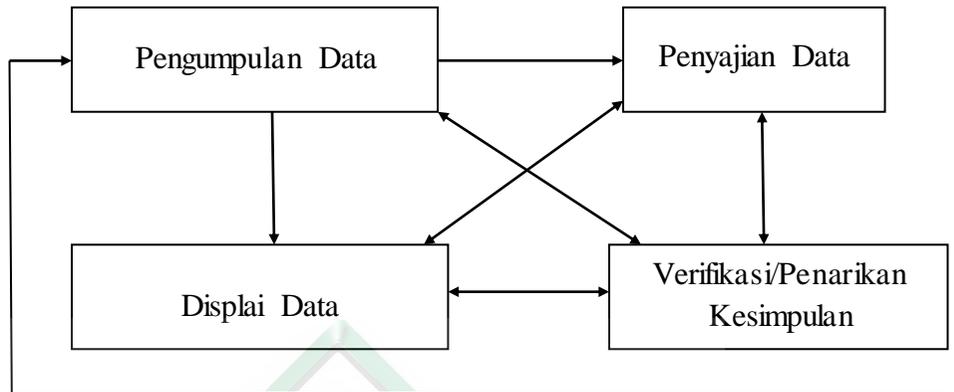
3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Selanjutnya langkah terakhir yang digunakan dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan berupa kesimpulan yang kredibel.³¹

Dalam penelitian ini, kesimpulan dan verifikasi dilakukan setelah rangkaian pengumpulan data selesai dilakukan. Setelah data reduksi kemudian di *display* menggunakan deskriptif naratif, kemudian ditarik satu tema dalam bentuk kesimpulan yang berupa deskripsi atau temuan yang bersifat umum untuk keperluan pengembangan lebih lanjut terkait Problematika Rendahnya Keterwakilan Politik Perempuan (Studi Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat). Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validnya.

³¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, (Bandung: Alfabeta CV, 2012), hlm. 99.

Pemetaan Konsep Pengumpulan Data Menurut Miles dan Huberman



7. Pengecekan keabsahan data

Dalam penelitian kualitatif ini, untuk menghasilkan data yang deskriptif. Adapun cara untuk menguji keabsahan data agar tidak terjadi kejanggalan dalam hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Diskusi Teman Sejawat

Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil penelitian sementara atau hasil akhir yang telah diperoleh peneliti lalu dilakukan analisis diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Setelah mendengar beberapa pendapat dari berbagai pihak dapat menjadi masukan yang akhirnya lebih memantapkan hasil peneliti nantinya.³²

2. Triangulasi Data

Teknik triangulasi atau konfirmasi ini bertujuan untuk menguji keabsahan data. Teknik triangulasi ini peneliti menggunakan dua cara, diantaranya:³³

- a. Triangulasi teori, dilakukan dengan cara memeriksa kebenaran temuan atau data dengan teori-teori yang ada.³⁴ Seperti dalam jurnal, artikel dan buku-buku.

³²Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Elfabeta, 2007), hlm 276.

³³*Ibid*, hlm. 274.

³⁴*Ibid*. hlm. 274.

- b. Triangulasi data, dilakukan dengan cara memeriksa kebenaran temuan atau data dengan menemukan data-data yang lain dianggap relatif sama. Adapun teknik ini dilakukan dengan mengecek penelitian yang pernah dilakukan orang lain yang memiliki sifat yang sama serta melakukan konfirmasi kebeberapa pihak yang terkait.³⁵

H. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, peneliti mendeskripsikan secara rasional pada masing-masing bab. Jadi dimana penelitian ini tersusun dalam empat (4) bab, diantaranya yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat Ruang Lingkup dan setting Penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan jadwal kegiatan penelitian.

BAB II PAPARAN DATA

Pembahasan pada bab ini merupakan bab yang berisi paparan data dari penelitian yang ditemukan di lapangan. Dalam hal ini akan mencoba menggambarkan secara singkat tentang lokasi penelitian dan temuan-temuan dalam melakukan penelitian dan tanggapan dari beberapa responden mengenai pembahasan dari penelitian ini.

BAB III PEMBAHASAN

Pembahasan yang dimuat dalam bab ini berisi tentang pembahasan dari penelitian ini yang termasuk di dalamnya temuan penelitian yang telah dipaparkan di bab II.

BAB IV PENUTUP

Dalam penutup ini merupakan bagian terakhir dari keseluruhan pembahasan penelitian yaitu akan diberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan beberapa saran sebagai jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi.

³⁵*Ibid.* hlm. 274.

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Dihadapkan dengan terbentuknya Nusa Tenggara Barat (NTB) berlangsung dalam rentang yang cukup lama. Provinsi NTB, sebelumnya sempat menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur dalam konsepsi Negara Republik Indonesia Serikat, dan menjadi bagian dari Provinsi Sunda kecil setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Seiring dinamika zaman dan setelah mengalami beberapa kali peoses perubahan sistem ketatanegaraan pasca diproklamasikannya Kemerdekaan Republik Indonesia, barulah terbentuk Provinsi NTB. Sehingga NTB secara resmi mendapat status sebagai provinsi sebagaimana adanya sekarang, sejak tahun 1958, barulah ditetapkannya Undang-Undang Nomer 64 Tahun 1958 tanggal 14 Agustus tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Bali, NTB dan NTT. Maka dari itu provinsi Nusa Tenggara Barat sebuah provinsi di Indonesia yang berada di bagian Barat kepulauan Nusa Tenggara. Ibu kota provinsi ini berada di kota Mataram. Wilayah Nusa Tenggara Barat merupakan wilayah yang terdiri dari 2 pulau besar, yaitu pulau Lombok yang banyak dihuni mayoritas oleh suku Sasak dan pulau Sumbawa banyak di huni oleh suku Samawa dan Mbojo, dan Nusa Tenggara Barat memiliki 10 Kabupaten 2 kota, termasuk kota Mataram, dan jumlah desa/kelurahan di Provinsi NTB sebanyak 1.139. Luas wilayah Nusa Tenggara Barat 20.153,15 (dua puluh ribu seratus lima puluh tiga koma lima belas) km, dan penduduknya berjumlah 5.320.092 jiwa (lima juta tiga ratus dua puluh ribu Sembilan puluh dua), dengan kepadatan 264 jiwa/km.

Gambar 2.1
Peta Provinsi Nusa Tenggara Barat



2. Diskripsi Profil Lembaga DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (disingkat DPRD Nusa Tenggara Barat atau DPRD NTB), adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. DPRD NTB beranggotakan 65 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD NTB terdiri dari 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRD NTB yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 2 September 2019 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, Kresna Menon, di Gedung DPRD Provinsi NTB.

a. Komposisi Anggota DPRD Provinsi NTB

Komposisi anggota DPRD NTB periode 2019-2024 terdiri dari 12 partai politik dimana Partai Golkar adalah partai politik pemilik kursi terbanyak yaitu 10 kursi, kemudian disusul oleh Partai Gerindra yang meraih 9 kursi serta Partai

Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat yang masing-masing meraih 7 kursi. Hasil Pemilu 2014, DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki anggota 65 orang, dengan jumlah kursi terbanyak diraih oleh Partai Golkar walaupun dalam jumlah perolehan suara Golkar kalah jumlah dengan PDI Perjuangan.

Selama masa reformasi, jumlah anggota DPRD NTB pada awalnya hanya 45 orang, kemudian bertambah menjadi 55 orang pada Pemilu 2004 dan bertambah lagi menjadi 65 orang pada Pemilu 2014. DPRD NTB paling sedikit ditempati oleh 10 partai politik dan paling banyak oleh 15 partai politik. Partai Golongan Karya merupakan pemenang bertahan selama masa reformasi sehingga tidak mengherankan jika posisi Ketua DPRD NTB selalu diisi oleh kadernya.

b. Alat kelengkapan

Alat Kelengkapan DPRD Berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Provinsi terdiri dari:

- Pimpinan
- Badan Musyawarah (Bamus)
- Komisi
- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)
- Badan Anggaran (Banggar)
- Badan Kehormatan (BK)
- Alat Kelengkapan Lain (dibentuk melalui Rapat Paripurna).

c. Pemimpin DPRD Provinsi NTB

Pimpinan DPRD Sesuai peraturan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan: 35-44 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 2 wakil ketua; 45-84 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 3 wakil ketua; dan 85-100 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 4 wakil ketua. Pimpinan DPRD NTB terdiri dari 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik

peraih kursi dan suara terbanyak secara berurutan. Berikut ini adalah daftar Ketua DPRD NTB selama masa reformasi.

Periode 2014-2019 Empat pimpinan definitif DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat masa bakti 2014-2019 resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh hakim tinggi Pengadilan Tinggi Mataram H Kusriyanto, MH, pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2014 Empat pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, yakni: ketua H Umar Said (Partai Golkar) dan para wakil ketua Mori Hanafi (Gerindra), TGH Mahali Fikri (Demokrat), dan Abdul Hadi (PKS). Rapat paripurna pelantikan dipimpin ketua dan wakil ketua sementara Hj Isvie Rupaeda dan TGH Mahaly Fikri. Pelantikan mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 161.52-3841 tahun 2014, tanggal 13 Oktober 2014, tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Provinsi. Proses penetapan empat pimpinan DPRD NTB tersebut didasarkan pada Keputusan Mendagri RI Nomor 161.52-3841 tahun 2014, tanggal 13 Oktober 2014, tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD NTB.

d. Komisi

Sesuai ketentuan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan 35-55 orang dapat membentuk 4 komisi dan DPRD Provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 orang dapat membentuk 5 komisi.

DPRD NTB memiliki 5 komisi sebagai berikut:

- Komisi I Bidang Pemerintahan, Hukum, dan HAM
- Komisi II Bidang Perekonomian
- Komisi III Bidang Keuangan dan Perbankan
- Komisi IV Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
- Komisi V Bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan.

e. Fraksi

Fraksi merupakan wadah berhimpun anggota DPRD dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD. Setiap fraksi

beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD. Setiap fraksi di DPRD NTB setidaknya beranggotakan 5 orang. Jumlah fraksi di DPRD NTB periode 2019-2024 adalah 9 fraksi, menurun dari periode sebelumnya yang terdiri dari 9 Fraksi yakni :

- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- Fraksi Partai Golongan Karya
- Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
- Fraksi Partai Nasdem
- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
- Fraksi Partai Demokrat
- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
- Fraksi Partai Amanat Nasional
- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

f. Data anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat

Tabel 1.1
Data anggota DPRD Provinsi NTB

No	Partai	Jumlah
1	Golongan Karya	10
2	Grindra	9
3	Partai Persatuan Pembangunan	7
4	Partai Keadilan Sejahtera	7
5	Demokrat	7
6	Partai Kebangkitan Bangsa	6
7	Partai Amanat Nasional	5
8	Berkarya	2
9	Nasdem	5
10	Partai Bulan Bintang	2
11	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4
12	Hanura	1

B. Faktor Rendahnya Keterwakilan Politik Perempuan (Studi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat)

Sebelum peneliti memaparkan hasil temuan terkait faktor rendahnya keterwakilan politik perempuan di DPRD provinsi NTB, terlebih dahulu peneliti akan memaparkan dari beberapa data sekunder yang peneliti dapatkan mengenai problematika rendahnya keterwakilan politik perempuan di DPRD provinsi NTB.

Tabel 1.2
Rekapitulasi persentase keterwakilan perempuan
dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD provinsi NTB
pada pemilihan umum 2019

No	partai	Jumlah Dapil	L	P	L+P	Persentase Perempuan
1	PKB	8	40	23	63	36.51
2	GERINDRA	8	41	24	65	36.92
3	PDI-P	8	38	26	64	40.63
4	GOLKAR	8	40	25	65	38.46
5	NASDEM	8	38	22	60	36.67
6	GARUDA	8	28	17	45	37.78
7	BERKARYA	8	41	24	65	36.92
8	PKS	8	38	25	63	39.68
9	PERINDO	8	37	20	57	35.09
10	PPP	8	39	26	65	40.00
11	PSI	6	5	7	12	58.33
12	PAN	8	38	21	59	35.59
13	HANURA	8	41	24	65	36.92
14	DEMOKRAT	8	37	27	64	42.19
19	PBB	8	40	22	62	35.48
20	PKPI	6	22	18	40	45.00

Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan tentang faktor rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD provinsi NTB, di mana ini merupakan langkah awal untuk mengurai satu variable paling urgen dalam penelitian ini, agar tidak terjadi miskonsep dalam memahami beberapa variable yang lain. Oleh karena itu, berdasarkan rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD provinsi NTB peneliti

akan menghadirkan data, dengan ini peneliti mewawancarai Hj. Misfalah, Hj. Nurlaela, dan Hj. Suryaharti untuk mendapatkan data.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hj. Misfalah salah satu narasumber perempuan yang tidak terpilih pada pileg 2019 dari pasangan partai Demokrat, sebagai berikut:

“Sebenarnya strategi kita kalau dari cara kita itu. Itu sudah yang tepat menurut kita. Tapi dilapangan kita tidak tau seperti apa. Dan terutama di dapil kita yaitu dapil 6 kalau dapil 6 itu kabupaten dompu, kabupaten bima, dan kota bima, ada tiga wilayah. Sebenarnya kita sudah mengatur strategi itu sedemikian rupa, hingga rencana kemenangan itu akan diraih. Yang kedua dari pengalaman sebelumnya kemudian dari hasil survey, kemudian dari teman-teman itu prediksi tidak ada yang mengatakan kita akan kalah, jadi semua yang terjadi diakhir itu diluar prediksi semua orang, bahkan orang yang tidak terlibat seperti kita yang caleg, yang tidak terlibat saja memprediksikan bahwa saya akan masuk, dan ada teman itu diprediksi tidak akan lolos malah dia yang lolos terus kita yang tidak lolos. Jadi itulah strategi itu tidak akan mesti, apa yang tidak mesti itu yang membuat kita menang. Kemudian disamping itu kita perempuan, perempuan itu ruang geraknya kan terbatas bukan undang-undang yang membatasi tapi kan didalam agama kita, kita menganut agama islam, jadi kita berbarur dengan laki-laki kan dibatasi sementara laki-laki itu sejak mereka lahir sudah diperkenalkan dengan alam yang luas, dengan dunia luas itu juga yang membuat kita tidak menang. Kemudian dari segi keberanian perempuan kan, bukan tidak berani kalau di adu dengan laki-laki tetap kebariannya dibawah standar karena perempuan lebih mengandalkan perasaan. Dan dari segi materi juga, tapi mungkin semua oranglah baik laki maupun perempuan, jadi kekalahan dari kendala segi materi itu baik laki maupun perempuan sama, siapa yang kaya dia dapat. Contoh kita yang di dapil 6 yang dipartai saya, yang di partai saya yang dapat suara terbanyak sekarang kan H. Mail yang mantan Wali Kota Bima. Jadi sebelum kita lahir orang ini sudah kaya dari dulu, jadi kita yang rakyat biasa harus melawan mereka ya berat, tapi itu tadi karena kita modal keberanian untuk beradu dengan laki, kalau dapet ya Alhamdulillah dan kemudian yang kemarin ada pergeseran dikit. Jadi sebenarnya kita dengan

caleg-caleg yang kemarin membagi sembako minsalkan karena saya dapat dari aspirasi kan, jadi aspirasi saya yang saya bagikan. Itu ketika yang kata orang serangan fajar itu ketika hari H itu, mereka sudah jalan dengan uangnya. Jadi pemilih kita yang sebelumnya yang menyatakan pastilah kalau ibu tidak ada yang begini sebelumnya, anggota DPRD yang pernah seperti itu tidak ada yang seperti itu. Sebenarnya bukan percaya atau gimana ya, tapi orang yang ngomong ini adalah orang yang pernah kita bantu juga, tapi buktinya setelah malam hari H itu semua berubah. Sehingga seharusnya Undang-Undang yang mengatur kuota 30% keterwakilan perempuan tidak hanya diatur pada pemenuhan Caleg saja karena ketika perhitungan suara pembagian kursi di DPRD tidak begitu, andaikan minsalnya kuota 30% keterwakilan perempuan diatur pada pencalegkan dan sampai pada pemenuhan kursi anggota dewan mungkin perempuan akan diadu dengan perempuan dalam penghitungan suara dan tidak dirangkin bersama dengan laki-laki. Sehingga dengan begitu saya rasa kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD akan terpenuhi”.³⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa kekalahan calon anggota legislatif perempuan kalah dikarenakan *pertama*, persaingan caleg perempuan akan berat menghadapi caleg laki-laki dalam memperebutkan kursi anggota dewan yang tersedia. *Kedua*, dari segi akal maupun fisik perempuan akan kalah tangguh jika disandingkan dengan laki-laki karena memiliki ruang gerak yang terbatas. *Ketiga*, dari segi materi perempuan juga kalah. Makahal ini yang mengakibatkan branding politik perempuan dimata masyarakat dianggap lemah sehingga aturan (norma) dari setiap pasangan calon anggota legislatif perempuan akan sulit dibangun karena bias terhadap pemilih yang lebih memilih pasangan calon laki-laki karena ruang gerak perempuan yang dibatasi dalam mengembangkan diri ke masyarakat. Oleh sebab itu, pengaturan tentang Undang-Undang yang mengatur kuota 30% keterwakilan perempuan harus diatur pada pemenuhan kursi anggota dewan dan tidak hanya diatur pada

³⁶Wawancara dengan Hj. Misfalah, Calon anggota legislatif DPRD Provinsi yang tidak terpilih dari partai Demokrat, wawancara dilaksanakan hari minggu tanggal 03 April 2022, kelurahan Pejeruk Kebon Bawak Tengah, pukul 10.11.

pencalegkan saja. Maka perempuan akan bersaing dengan perempuan dan kuota 30% keterwakilan perempuan akan terpenuhi sesuai bunyi dalam Undang-Undang tersebut.

Lebih lanjut informasi ditambah lagi dari salah satu narasumber perempuan yang tidak terpilih pada pileg 2019 yang bernama ibu Hj. Nurlaela dari partai PKB, sebagai berikut:

“Strategi saya saat dilapangan melakukan pendekatan kepada masyarakat, kami wanita berjuang untuk menang namun pandangan masyarakat masih saja sering menganggap perempuan remeh atau sebelah mata, sehingga saya ingin membuktikan persepsi bahwa perempuan mampu untuk bersaing di dunia politik dan bukan sebagai pelengkap dalam kehidupan berumah tangga. Sebenarnya tidak ada hambatan dari strategi itu, tapi saya kan tinggal di Mataram. Dan dapil saya NTB 6, jadi saya tidak terlalu dikenal gitu. Karena gini, kami wanita itu berjuangya seperti saya, Umi Tien dan Hj. Misfalah kalau berjuang itu memang seperti laki-laki yang kalau laki-laki lari pudar ya kami lari pudar. Kita ini orang gila karena kenapa?, kami perempuan, kami harus menang, tapi kan pandangan orang-orang masyarakat apa sih bisanya perempuan itu. Tapi kami saya pribadi buktikan ini program saya. Sehingga kebanyakan dari pasangan caleg perempuan karena kurangnya dukungan dari keluarga itu. Namun itu tidak mengubah semangat para perempuan yang akan berjuang di DPRD Provinsi ataupun kabupaten pada pemilihan berikutnya, saya akan berjuang lagi dan saya akan mendukung para perempuan siapa saja yang ikut andil dalam pemilihan nantinya.”³⁷

Melalui pernyataan tersebut persepsi masyarakat mengenai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang cenderung bias kearah membatasi peran perempuan pada urusan rumah tangga. Sehingga membangun ikatan atau jaringan kepada masyarakat ataupun keluarga terhadap perempuan yang akan menduduki kursi anggota dewan agak sulit dibendung. Namun demikian tidak mengubah semangat perempuan untuk terus maju dalam dunia

³⁷Wawancara dengan Hj.Nurlaela, Calon anggota legislatif DPRD Provinsi yang tidak terpilih dari partai PKB, wawancara dilaksanakan hari rabu tanggal 06 April 2022, Melalui Vidio Call (VC) WhatsApp, pukul 16.05.

perpolitikan, dibuktikan dengan semangat salah satu calon anggota legislatif perempuan yang gagal terpilih pada pileg 2019 namun akan tetap berjuang pada pemilihan berikutnya.

Informasi juga ditambah dari salah satu narasumber perempuan yang tidak terpilih pada pileg 2019 yang bernama ibu Hj. Suryahartin dari partai NasDem, sebagai berikut:

“Kalau berbicara tantangan sebenarnya dari eksternal itu tidak ada, saya maju periode kedua suara meningkat, dulu saya naik DPRD periode pertama 10 ribu kurang tapi kalau kemarin hampir 12 ribu, tetapi apa yang membuat saya kalah, tapi sebenarnya bukan kalah tapi tersenggol, ada pesaing yang masuk sebenarnya masuk tidaknya dia, tetap salah kita untuk mendapatkan kursi, tapi itulah namanya politik. Detik-detik deadline dia masuk di partai kita dari organisasi besar otomatis dia lebih tinggi suaranya daripada kita, karena soalnya dari sisi konstituen, sisi pergerakan, ikatan emosional di masyarakat itu tidak ada masalah. Kalau strategi saya melakukan pendekatan dengan masyarakat, saya naik dulu di periode pertama boleh dibilang, saya tidak pernah beli suara, yang kalau orang bilang bahwa dengan uang akan naik. Saya murni hanya pendekatan kepada masyarakat, kalau bantuan komunal secara umum bantuan kebutuhan, pendampingan, pembimbingan iya. Tetapi kalau real dengan nyata-nyata dengan uang saya tidak. Dan kalau berbicara hambatan pasti ada dalam strategi itu, namanya juga masyarakat susah-susah gampang. Apalagi dengan eskalasi politik yang sekarang saking masyarakatnya sering memilih, apa sih yang tidak dipilih? Kadus dipilih, pekasih dipilih, jangan kata bupati, gubernur, wali kota juga dipilih. Saking seringnya mereka memilih akhirnya minset mereka berubah, kalau dulu mungkin mereka ingin dalam hal DPR misalnya, kalau dulu mungkin awal-awalnya betul-belul yang bisa mengayomi mereka, memperjuangkan mereka, karena itu yang sesungguhnya. Lama-lama saking seringnya dan banyaknya godaan dari seringnya pentas politik ini jadi menawarkan dia juga, jadi ngapain kamu milih itu mending ini, jadi akhirnya menjadi pesta demokrasi. Artinya sekali setahun dapat bayaran dari suaranya itu karena cepat tergiur oleh materi, sehingga kepercayaan pemilih yang awalnya akan dipilih berubah jika diberikan materi dll. Sehingga akan jauh dari target yang kita dapat kalau satu lokasi walaupun dia

sudah setia dengan kita, disitu kita targetkan dengan seratus suara kita dapat, empat puluh atau tiga puluh sudah syukur, karena masyarakat juga punya kebutuhan jadi semakin sulit untuk dipegang, jadi mereka seperti take in give”.³⁸

Tanggapan tersebut menyatakan bahwa kekalahan perempuan. *Pertama*, hubungan dengan proses seleksi dalam partai politik. Seleksi terhadap para kandidat biasanya dilakukan oleh sekelompok kecil pejabat atau pimpinan partai, yang hampir selalu laki-laki. *Kedua*, kepercayaan masyarakat akan cepat berubah jika di beri materi (uang), sehingga hal ini yang menunjukkan pendidikan politik terhadap pemilih perlu dilakukan karena jika tidak, membangun kepercayaan ke masyarakat akan tetap sulit dibangun jika terus-terusan mengandalkan uang.

Maka berdasarkan paparan data di atas dari hasil wawancara dengan ibu Hj. Misfalah, Hj. Nurlaela, dan Hj. Suryaharti tentang seputar kegagalan calon anggota legislatif pada pemilihan 2019 di DPRD provinsi, dengan tujuan untuk mendapatkan data tentang faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya keterwakilan politik perempuan di DPRD provinsi NTB, di mana peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor utama disebabkan oleh laki-laki dan perempuan dalam memandang perempuan. Adanya budaya patriarki di kalangan masyarakat mengakar dan mendominasi kehidupan, bahkan dalam lingkungan terkecil seperti keluarga nuansa dominasi laki-laki sangat kuat. Label dan cap diberikan pada sosok perempuan yang sangat kental sebagai orang lemah, telah di doktrin secara turun-temurun. Belum lagi didukung oleh persepsi masyarakat NTB yang dominan agama islam sehingga membatasi perempuan dalam kehidupan publik atau berpolitik.

Faktor lain yang menyebabkan rendahnya keterwakilan politik perempuan di DPRD Provinsi NTB yaitu dari segi modal ekonomi pasangan calon legislatif perempuan. Wanita yang secara ekonomi sangat tergantung pada laki-laki tentu akan menemui

³⁸Wawancara dengan Hj. Suryahartin, Calon anggota legislative DPRD Provinsi NTB yang tidak terpilih dari partai NasDem, wawancara dilaksanakan Selasa tanggal 12 April 2022, Kantor Gerbang Emas NTB Sweta, pukul 14.45.

hambatan besar masalah pendanaan kampanye yang membutuhkan dana yang banyak, karena kebanyakan masyarakat menganggap pemilihan adalah pesta demokrasi yang setiap tahunnya diberi uang, maka hal ini yang mengakibatkan kepercayaan masyarakat akan cepat berubah jika di beri materi (uang), meskipun caleg perempuan tersebut memiliki potensi (kualitas) dalam hal perpolitikan. Sehingga hal ini yang menunjukkan pendidikan politik terhadap pemilih perlu dilakukan karena jika tidak, membangun kepercayaan ke masyarakat akan tetap sulit dibangun jika terus-terusan mengandalkan uang.

Kendala selanjutnya adalah mengenai angka pendapatan suara di suatu wilayah dibagi kursi yang diperebutkan disini persaingan caleg perempuan akan berat menghadapi caleg laki-laki dalam memperebutkan kursi yang tersedia. Maka hal ini yang mengakibatkan branding politik perempuan dimata masyarakat dianggap lemah sehingga aturan dari setiap pasangan calon anggota legislatif perempuan akan sulit dibangun karena bias terhadap pemilih yang lebih memilih pasangan calon laki-laki karena ruang gerak perempuan yang dibatasi dalam mengembangkan diri ke masyarakat.

Dalam hal ini, selain menyangkut mengenai problematika rendahnya keterwakilan politik perempuan di DPRD provinsi NTB, peneliti juga mewawancarai terkait bagaimana upaya dalam meningkatkan keterwakilan politik perempuan. Dalam hal ini bertujuan untuk memberikan sedikit informasi terhadap yang akan melakukan penelitian selanjutnya. Adapun yang menjadi informan di sini yaitu calon legislatif gagal yang peneliti wawancarai terlebih dahulu, diantara Hj. Suryahartin, Hj. Misfalah, dan Hj. Nurlaela. Agar dalam penelitian ini mendapatkan informasi yang lebih akurat serta terpercaya.

Berikut hasil wawancara dengan ibu Hj. Misfalah salah satu narasumber perempuan yang tidak terpilih pada pileg 2019 dari pasangan partai Demokrat, sebagai berikut:

“Kalau menurut saya rubah aturan tadi, 30% itu mulai pencalegkan sampai ke kursi legislatifnya. Kalau seperti ini

terus yang dilakukan maka seperti inilah yang terjadi diketerwakilan di DPRD itu tentu pasti kurang, selalu akan kurang. Yang dulu saja seharusnya dari 65 itu 30% sebenarnya 11 orang, namun yang kemarin saja kita hanya 6 orang periode yang lalu itu tidak terpenuhi tapi sudah sangat luar biasa orang-orang juga bilang wah luar biasa periode ini perempuannya banyak, nah sekarang ini hanya ibu Isvie yang naik kita semua tergusur, di samping itu kan aturannya undang-undang itu kan melarang mony politik, tetapi buktinya semua orang melakukan itu, jadi keterbatasannya juga kita disitu. Tergantung keberani juga, jadi kalau perempuan itu ruang gerak perempuan itu terbatas, keberanian untuk menghalalkan segala macam cara itu juga terbatas karena mungkin tidak terbiasa, karena kita kan biasa di didik di dalam lingkup yang kecil tidak terlalu diberi kebebasan untuk berbaur dengan yang lebih luas, sehingga juga mungkin itu kendala kita. Dan dari segi materi juga, tapi mungkin semua oranglah baik laki maupun perempuan, jadi kekalahan dari kendala segi materi itu baik laki maupun perempuan sama, siapa yang kaya dia dapat. Contoh kita yang di dapil 6 yang dipartai saya, yang di partai saya yang dapat suara terbanyak sekarang kan H. Mail yang mantan Wali Kota Bima. Jadi sebelum kita lahir orang ini sudah kaya dari dulu, jadi kita yang rakyat biasa harus melawan mereka ya berat, tapi itu tadi karena kita modal keberanian untuk beradu dengan laki, kalau dapet ya Alhamdulillah dan kemudian yang kemarin ada pergeseran dikit. Jadi sebenarnya kita dengan caleg-caleg yang kemarin membagi sembako minsalkan karena saya dapat dari aspirasi kan, jadi aspirasi saya yang saya bagikan. Itu ketika yang kata orang serangan fajar itu ketika hari H itu, mereka sudah jalan dengan uangnya. Jadi pemilih kita yang sebelumnya yang menyatakan pastilah kalau ibu tidak ada yang begini sebelumnya, anggota DPRD yang pernah seperti itu tidak ada yang seperti itu. Sebenarnya bukan percaya atau gimana ya, tapi orang yang ngomong ini adalah orang yang pernah kita bantu juga, tapi buktinya setelah malam hari H itu semua berubah”.³⁹

³⁹Wawancara dengan Hj. Misfalah, Calon anggota legislatif DPRD Provinsi yang tidak terpilih dari partai Demokrat, wawancara dilaksanakan hari minggu tanggal 03

Dalam tanggapan tersebut calon anggota legislatif yang gagal berharap bahwa dalam meningkatkan keterwakilan politik perempuan di DPRD provinsi NTB, kedepannya agar pengaturan tentang Undang-Undang yang mengatur kuota 30% keterwakilan perempuan harus diatur pada pemenuhan kursi anggota dewan dan tidak hanya diatur pada pencalegkan saja. Maka perempuan akan bersaing dengan perempuan dan kuota 30% keterwakilan perempuan akan terpenuhi sesuai bunyi dalam Undang-Undang tersebut.

Lebih lanjut dijelaskan dari hasil wawancara dengan ibu Hj. Nurlaela dari partai PKB, sebagai berikut:

“Kalau laki-laki satu kilo ya perempuan tidak boleh satu kilo ya harus lima kiloan, minsalkan contohnya. Strategi semuanya punya strategi, yang paling pintar itu semuanya, jadi strategi kita ya harus lebih dari laki-laki kalau dia mau menang, karena yang masuk di dewan itu bukan masalah laki-laki ataupun perempuan tapi mereka punya strategi untuk memenangkan pemilu. Siapapun pemenangnya mesti ada nama partai disitu”.⁴⁰

Meningkatkan keterwakilan perempuan di DPDR provinsi NTB perlu adanya dorongan untuk para perempuan terlibat aktif dalam berbagai program organisasi agar dapat memberikan wawasan luas dan pengalaman baru serta akses untuk masuk ke dalam dunia politik, sehingga dengan itu perempuan mampu berani terjun ke dunia politik serta selalu membangun semangat untuk terus berperan aktif dalam hal mengalahkan strategi politik laki-laki pada pemilihan selanjutnya.

Informasi ditambah lagi dari salah satu narasumber perempuan yang tidak terpilih pada pileg 2019 yang bernama ibu Hj. Suryahartin dari partai NasDem, sebagai berikut:

April 2022, kelurahan Pejeruk Kebon Bawak Tengah, pukul 10.11.

⁴⁰Wawancara dengan Hj.Nurlaela, Calon anggota legislatif DPRD Provinsi yang tidak terpilih dari partai PKB, wawancara dilaksanakan hari rabu tanggal 06 April 2022, Melalui Vidio Call (VC) WhatsApp, pukul 16.05.

“Sebenarnya pertama, keseriusan semua parpol untuk mendudukkan perempuan, artinya harus betul-betul berpotensi jangan seperti yang tadi sebagai pelengkap penderita tadi, kadang-kadang nanti dia caleg-caleg yang laki membiayai supaya 30% itu tercapai, padahal nanti itu tidak ada suara. Kedua lebih diperbanyak pendidikan politik bagi pemilih, nanti peningkatan kapasitas sebagai calon perempuan yang akan maju. Kita yang maju harus mempersiapkan diri kita, layak tidak saya, kalau tidak layak jangan mau jadikan diri sebagai pelengkap penderita”.⁴¹

Melalui pernyataan tersebut salah satu dalam mengupayakan peningkatan keterwakilan politik perempuan perlu diimbangi dengan kualitas yang dimiliki kaum perempuan, dan dapat memahami kepentingan perempuan serta mampu untuk memperjuangkannya, karena sering kali perempuan seringkali dijadikan pelengkap kuota 30%, sehingga hal itu yang memicu anggapan masyarakat bahwa branding politik perempuan dianggap lemah, dikarenakan perempuan tersebut padahal tidak berpotensi dalam bidang itu (politik). Selain itu, agar masyarakat tidak lagi menganggap dunia politik adalah dunianya laki-laki maka, pemerintah perlu memberikan solusi seperti memberikan kesadaran publik melalui pendidikan kewarganegaraan dan pemilih, politik kepemiluan, serta dukungan kapasitas atau pengembangan jaringan dan koalisi. Supaya kedepannya dapat mengupayakan peningkatan angka keterwakilan perempuan hingga mencapai batas keseimbangan gender sehingga mempermudah penyampaian kepentingan dan hak-hak perempuan atau membuat acara seminar tentang peningkatan keterwakilan perempuan.

⁴¹Wawancara dengan Hj. Suryahartin, Calon anggota legislative DPRD Provinsi NTB yang tidak terpilih dari partai NasDem, wawancara dilaksanakan Selasa tanggal 12 April 2022, Kantor Gerbang Emas NTB Sweta, pukul 14.45.

BAB III

PEMBAHASAN

Dari data yang ditemukan dilapangan dan telah dipaparkan pada bab II sebelumnya, Lahirnya kuota 30% perempuan melalui Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2003, tentang Pemilihan Umum, pasal 65 ayat 1 menyatakan “setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”, sebenarnya ini sudah menjadi berita baik bagi perempuan. Lebih ditegaskan lagi dalam UU No. 2 tahun 2011 tentang perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik diamanahkan bahwa pentingnya keterwakilan perempuan di dalam sebuah partai politik dan menjadi sebuah persyaratan untuk mengikuti pemilihan umum bagi semua partai politik dan partai politik harus memenuhi persyaratan itu.

Akan tetapi, sangat disayangkan partisipasi perempuan untuk memasuki wilayah publik ini memang sudah meningkat, akan tetapi persentasenya masih rendah meskipun dijamin oleh ketentuan Undang-Undang yang dilihat pada rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD provinsi NTB dikarenakan yang berhasil menduduki kursi DPRD provinsi hanya satu dari total merebut suara sebanyak 351.

Dilihat dari beberapa artikel, salah satu dimana yang menjadi acuan peneliti dalam hal ini yaitu:

Perpustakaan UIN Mataram

Gambar 2.2

Kiriman artikel tentang satu-satunya perempuan yang lolos ke DPRD provinsi NTB



Dari artikel tersebut dengan menjelaskan perempuan pada periode 2019-2024 yang berhasil terpilih pada pemilihan legislatif (Pileg) menurun, khususnya untuk DPRD provinsi NTB. Berikut ungkapan Baiq Isvie Rupaeda:

“Ini sangat menyedihkan nasib caleg perempuan pada pileg kali ini, harapan saya sih harusnya banyak perempuan yang terpilih seperti lima tahun lalu, selama ini kan kami ada 6 orang perempuan. Maka sedih jika ke depan saya sendirian”.⁴²

Tanggapan tersebut menyatakan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD provinsi NTB masih rendah, dilihat pada penghitungan suara dan daftar calon anggota legislatif perempuan yang sudah di gambarkan di atas bahwasanya daftar nama Caleg perempuan sebanyak 351 namun yang berhasil menduduki kursi DPRD provinsi hanya satu yaitu Baiq. Isvie Rupaeda dari Dapil NTB 3 dengan total perolehan suara sebanyak 18.634,

⁴²Yan, *Isvie Satu-Satunya Perempuan Lolos ke DPRD NTB*, <https://radarlombok.co.id/isvie-satu-satunya-perempuanlolos-ke-dprd-ntb.html>, diakses pada 15 Desember 2021, pukul 23.44.

hal ini yang menunjukkan rendahnya keterwakilan politik perempuan di DPRD Provinsi NTB.

Padahal fungsi keterwakilan politik ini sangatlah berpengaruh penting untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas akan memberikan dampak positif bagi masyarakat yaitu suara rakyat terwakili, kepentingan rakyat terakomodasi, terciptanya transparansi dan pemerintahan yang bersih.

Maka rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif mengakibatkan minimnya peran perempuan dalam setiap pengambilan keputusan. Realitas politik yang menunjukkan masih rendahnya keterwakilan kaum perempuan di lembaga DPRD provinsi NTB yaitu masih berada di bawah proporsi (*under-represented*) mengindikasikan bahwa keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik yang kurang. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Sri Lestari Rahayu bahwa terdapat empat faktor yang menghambat rendahnya keterwakilan perempuan untuk terlibat di bidang politik antara lain dapat disimpulkan sebagai berikut: ⁴³

Faktor *pertama*, adalah sosial budaya yakni anggapan adanya dominasi budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan baik wilayah domestik maupun publik yang masih kuat, sehingga menyebabkan adanya faktor kekuasaan laki-laki (*stereotip*) terhadap perempuan yang ingin masuk atau berkarir di dunia politik.

Kedua, hambatan sistem politik, yakni angka pendapatan suara di suatu wilayah dibagi kursi yang diperebutkan karena kekuatan perempuan untuk berkuasa atau meraih kekuasaan karena persaingan caleg perempuan akan berat menghadapi caleg laki-laki dalam memperebutkan kursi yang tersedia. Apalagi banyak daerah-daerah yang budaya patriarkinya sangat kuat dan daya penerimaan terhadap perempuan yang berkiprah di dunia politik sangat rendah.

Dan faktor *ketiga*, adalah hambatan sosial ekonomi yakni kemiskinan dan pengangguran, lemahnya sumber-sumber keuangan yang memadai, dan rendahnya akses pendidikan, termasuk pendidikan politik, serta beban ganda perempuan.

⁴³ Rahayu, Sri Lestari, 2004, "Rintangan-Rintangan Pemberlakuan Ketentuan Kuota 30% Perempuan Di Legislatif Dalam UU Pemilu No. 12/2003 (Sudi Di Kota Surakarta), *jurnal Hukum Univ*, Vol. 67. No. 2, hlm. 58

Terakhir faktor *keempat*, adalah hambatan psikologis kekuatan perempuan untuk berkuasa atau meraih kekuasaan.

Maka pembahasan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya keterwakilan politik perempuan di DPRD Provinsi NTB, dianalisis menggunakan teori modal sosial seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Teori modal sosial ini sebagai salah satu komponen umum dalam menggerakkan kebersamaan, mobilitas ide, kesaling percayaan dan kesaling menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama. Teori modal sosial ini terutama berakar atau memiliki konsep pada gagasan kepercayaan, norma, dan jaringan informal.⁴⁴

1. Kepercayaan (*Trust*)

Rasa percaya merupakan dasar dari perilaku moral dimana modal sosial dibangun. Rasa saling mempercayai yang tinggi akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai ragam bentuk dan dimensi terutama dalam konteks membangun kemajuan bersama. Membangun *general trust* (kepercayaan umum) terhadap individu atau orang lain agak sulit dibendung.⁴⁵ Peristiwa pada pemilihan anggota legislatif tahun 2019 salah satu faktor rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD provinsi NTB karena persaingan caleg perempuan akan berat menghadapi caleg laki-laki dalam memperebutkan kursi anggota dewan yang tersedia. Dan ketergantungan ekonomi membuat perempuan lemah dalam aspek yang lain, termasuk kemandirian dalam mengambil keputusan, akses sosial, politik dan kesempatan untuk mengembangkan diri karena kampanye politik membutuhkan dana yang banyak. Wanita yang secara ekonomi sangat tergantung pada laki-laki tentu akan menemui hambatan besar masalah pendanaan kampanye. Meskipun caleg perempuan tersebut memiliki kualifikasi sebagai tokoh yang potensial, wanita yang tidak mandiri secara ekonomi tidak dapat berbuat banyak. Sehingga membangun kepercayaan masyarakat terhadap individu merupakan tantangan bagi setiap pasangan calon anggota legislatif perempuan karena sebagian besar masyarakat menganggap pemilihan adalah suatu pesta demokrasi yang setiap

⁴⁴*Ibid*, Dwiningrum, Siti Irene Astuti, hlm.1.

⁴⁵*Ibid*, Syahra, Rusydi, hlm. 4

tahunnya akan dibayar, sehingga persepsi ini yang membuat kepercayaan masyarakat akan cepat berubah jika diberi materi (uang), maka hal ini yang menunjukkan pendidikan politik terhadap pemilih perlu dilakukan karena jika tidak, membangun kepercayaan ke masyarakat akan tetap sulit dibangun jika terus-terusan mengandalkan uang.

2. Norma

Norma sosial ini akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Sehingga norma itu adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dapat dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu.⁴⁶ Namun sangat disayangkan seringkali aturan (norma) dari para calon anggota legislatif perempuan relatif tidak dituruti, dikarenakan masyarakat menganggap branding perempuan terhadap politik itu lemah jika bergelut di dunia politik karena dari segi akal maupun fisik perempuan akan kalah tangguh jika disandingkan dengan laki-laki disebabkan ruang gerak yang terbatas, maka hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi norma yang tumbuh di dalam organisasi juga tidak akan menentukan apakah norma akan memperkuat kerekatan hubungan antara individu, maka ini juga bagian dari faktor rendahnya keterwakilan politik perempuan di DPRD provinsi NTB.

3. Jaringan

Jaringan sosial sebagai hubungan-hubungan yang tercipta antar suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Kelompok yang dimaksud dimulai dari yang terkecil yaitu; keluarga, kelompok kekerabatan, komunitas tetangga, kelompok-kelompok asosiasi, organisasi formal dan bentuk-bentuk lainnya.⁴⁷ Karena dinamika kehidupan sosial merupakan jaringan sosial yang telah dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan dan tujuan dengan pola koneksi yang tidak hanya didasarkan pada individu, tetapi kelompok dan organisasi.⁴⁸ Oleh sebab itu, dalam membangun jaringan sosial atau ikatan terhadap

⁴⁶Ibid, Syahra, Rusydi, hlm. 4

⁴⁷Ibid, hlm 4

⁴⁸ Winengan, Januari 2021, "Pembinaan Sosial Masyarakat Nelayan Jaringan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat", *Jurnal Sosiologi*, Vol. 26, No. 1, hlm 44-45

keluarga maupun masyarakat adalah salah satu kendala juga bagi pasangan caleg perempuan dikarenakan persepsi masyarakat selalu melekat mengenai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang cenderung bias kearah membatasi peran perempuan pada urusan rumah tangga (budaya patriarki).

Di NTB dikatakan masih kental budaya patriarki karena masih adanya persepsi masyarakat tentang perempuan yang memiliki kelemahan, keterbatasan, selalu menggunakan perasaan, dan tidak logis. arenanya perempuan dianggap tidak layak bekerja di sektor publik yang keras, kompetitif, dan rasional. Perempuan yang bekerja di publik, membangun karir, dan berkompetisi dengan laki-laki dianggap menyalahi kodrat, didukung oleh persepsi masyarakat NTB yang dominan agama islam sehingga membatasi perempuan dalam kehidupan publik atau berpolitik.⁴⁹ Sebagaimana dalam firman Allah SWT yang berbunyi;

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah.”
(Q.S. al-Ahzab[33]: 33).⁵⁰

Namun walaupun demikian tidak mengubah semangat perempuan untuk terus maju dalam dunia perpolitikan, dibuktikan dengan semangat salah satu calon anggota legislatif perempuan yang gagal terpilih pada pileg 2019 namun akan tetap berjuang pada pemilihan berikutnya.

Selain faktor-faktor diatas yang merupakan kendala atau faktor bagi perempuan dalam dunia politik, maka ada faktor-faktor yang timbul dari perempuan itu sendiri dalam hal ini disebut faktor internal,

⁴⁹Lusia Palulungan.dkk, 2020, *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*, Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), hlm. 4

⁵⁰ Al- Ahzab [33]: 33.

yang di mana berpengaruh pada rendahnya keterwakilan politik perempuan di bidang politik di DPRD provinsi NTB dianalisis menggunakan teori perwakilan politik perempuan sebagai berikut:

1. Perwakilan deskriptif di mana perempuan mengusulkan bahwa seharusnya perempuan mewakili kaum perempuan sebanding dengan jumlah penduduk mereka. Tuntutan-tuntutan seperti itu menantang sistem-sistem perwakilan, di mana banyak kelompok secara tetap disingkirkan. Dalam perwakilan deskriptif, para wakilnya ada atas nama pribadi dan hidup mereka sendiri dalam arti tertentu yang khas lebih besar dari orang-orang yang mereka wakili. Sedangkan perwakilan deskriptif sulit terwujud karena menuntut keterampilan. Dan keterampilan itu sendiri tidak dapat didistribusikan secara sama. Dikarenakan banyak perempuan tidak senang berorganisasi karena menganggap dirinya tidak berpotensi dalam dunia politik atau legislatif karena minimnya pengetahuan perempuan tentang politik serta banyak aktifitas yang harus dibatasi dalam bergelut di dunia publik. Dan perempuan sering kalah dalam segi psikologis, sehingga tidak siap mental untuk memasuki dan melaksanakan fungsi-fungsi jabatan sebagai perumus kebijakan maupun pengambilan keputusan.
2. Dan dari segi perwakilan substantif dari suatu kelompok secara paling sederhana dilukiskan sebagai perwakilan kepentingan-kepentingannya. Dalam berbagai keadaan politik, perwakilan kepentingan seseorang mungkin lebih penting daripada perwakilan kelompok. Artinya, setelah pemilihan pertama pasca hak pilih perempuan diberikan, kaum feminis mungkin lebih memilih para pendukung isu-isu perempuan, apapun jenis kelaminnya, daripada memilih perempuan yang tidak mendukung isu-isu feminis. Perwakilan substantif mengarahkan perhatian pada ide mengenai kepentingan. Dalam politik identifikasi kepentingan itu kontroversial. Teori feminis dengan sangat hati-hati menyadari bahwa kelas, ras, etnis, seks, kemampuan fisik, status perkawinan, keibuan, dan agama memecah belah perempuan sekaligus menjadi sumber penting bagi identitas dan kepentingan mereka. Kesulitan-kesulitan untuk menempatkan kaum perempuan dan kepentingan-

kepentingan mereka ini ke dalam teori-teori arus utama mengenai perwakilan politik perempuan di DPRD provinsi NTB sehingga menunjukkan kompleksitasnya proyek untuk mengintegrasikan kaum perempuan ke dalam wacana politik. Selain itu anggapan dikalangan perempuan bahwa dunia politik penuh kekerasan sehingga dipandang sebagai dunianya laki-laki, sehingga perempuan tidak ingin berkecimpung didalamnya. Dan perempuan sering kalah dalam bermodalan sosial, sehingga tidak siap mental untuk memasuki dan melaksanakan fungsi-fungsi jabatan sebagai perumus kebijakan maupun pengambilan keputusan.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya, peneliti memberikan kesimpulan bahwa, sebagaimana dinyatakan bahwa jumlah perempuan berpotensi di bidang politik DPRD provinsi NTB masih sedikit untuk mampu berkompetisi dengan para laki-laki yang selama ini dikonstruksikan untuk lebih maju daripada perempuan. Sehingga partisipasi perempuan untuk memasuki wilayah publik ini memang sudah meningkat, akan tetapi persentasenya masih rendah di DPRD provinsi NTB, meskipun dijamin oleh ketentuan Undang-Undang. Adapun kendala perempuan secara eksternal dan internal yang akan dihadapi ketika akan masuk di bidang politik DPRD provinsi NTB adalah pertama, secara eksternal membangun kepercayaan, norma, serta jaringan sosial di masyarakat sangat sulit dikarenakan masih maraknya ideologi gender dan pola-pola kultural maupun peran sosial yang ditetapkan sebelumnya diberikan kepada perempuan dan laki-laki. Kedua faktor internal terhadap kendala ekonomidan rendahnya akses pendidikan termasuk pendidikan politik terhadap perempuan membuat jadi penghalang perempuan untuk maju pada kursi dewan.

B. Saran

1. Dalam mengatasi tantangan dan kendala-kendala yang ada, terlebih hambatan tersebut erat kaitannya dengan budaya dan ideology yang telah tertanam di masyarakat, pemerintah perlu memberikan solusi seperti memberikan kesadaran publik melalui pendidikan kewarganegaraan dan pemilih, politik kepemiluan, serta dukungan kapasitas atau pengembangan jaringan dan koalisi. Supaya kedepannya dapat mengupayakan peningkatan angka keterwakilan perempuan hingga mencapai batas keseimbangan gender sehingga mempermudah penyampaian kepentingan dan hak-hak perempuan

atau membuat acara seminar tentang peningkatan keterwakilan perempuan.

2. Dalam penelitian ini masih banyak sekali kekurangan, terlebih peneliti tidak membahas solusi dalam mengatasi bagaimana upaya dalam meningkatkan keterwakilan politik perempuan di DPRD provinsi NTB, untuk itu peneliti berharap agar peneliti selanjutnya membahas bagaimana solusi dalam mengatasi faktor rendahnya keterwakilan politik perempuan di DPRD provinsi NTB.
3. Dalam penelitian ini, peneliti tidak memperdalam pendidikan politik yang seperti apayang mampu mengatasi dalam meningkatkan keterwakilan politik perempuan di DPRD provinsi NTB, sehingga peneliti berharap agar peneliti selanjutnya mampu mencari solusi pendidikan seperti apa semestinya.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Afifuddin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Andriana N., *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif*, Jakarta: PT. Gading Inti Prima, 2012.
- Ani Widyani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005.
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Astrit Anugrah, *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*, Jakarta: Penerbit Pancuran Alam, 2009.
- Audara Jauvara, 2018, "Potret Keterwakilan Politik Perempuan", *jurnal Inada*, Vol. 1, No. 1.
- Budiarto, Eko, Skm, dkk, *Pengantar Epidemiologi*, Jakarta: Kedokteran EGC, 2003.
- Djam'an Satorik dkk, *metodologi penelitian kualitatif....*.
- Emiliana Manek, 2015, *Analisis Pengetahuan, Sikap, Keterampilan, Teknik Politik Praktis Perempuan Belu di Kabupaten Belu*, Program pascasarjana Universitas Nusa Cendana, Vol. 20, No. 2.
- Harpani Fatimah Akhmad Rudini Akbar, 2014 "Problematika Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Banjarmasin", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 7.
- I. N. Budiantara dan Fajriyyah, N., 2015, "Pemodelan Indeks Pembangunan Gender dengan Pendekatan Regresi NonParametrik Spline di Indonesia", *Jurnal Sains dan Seni ITS*.Vol.4, No. 2.
- Jones, P., *Pengantar Teori-Teori Sosial*, Jakarta: LP3ES, 2003.
- Joni Lovenduski, 2005, *State Feminism and Political Representation*, (New York: Cambridge University Press).

- Juliansyah Nor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2011.
- K. Sudarti dan P. Prasetyaningtyas, 2011, "Peningkatan Minat dan Keputusan Berpartisipasi Akseptor KB", *Jurnal Dinamika Manajemen*. Volume 2, 2011, Pages.
- Lailatul Monawarah 2017, "Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah (Studi calon Anggota Legislatif perempuan Pada Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tahun 2014)", *Aspirasi: Jurnal S-1 Ilmu Politik*, <https://jurnafis.untan.ac.id>, Vol. 5, No.2.
- Lusia Palulungan. dkk, 2020, *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*, Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), hlm. 4
- Mochtar Masboed, *Negara, Kapital, dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- P. Kusuma, 2017, "Analisis Tingkat Partisipasi Kerja (TPAK) Provinsi Nusa Tenggara Barat". *Jurnal Valid*. Vol. 11, No. 2: 26-32.
- Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Rusydi Syahra 2003, "Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi", *jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 5, No. 1.
- Siti Irene Astuti Dwiningrum, 2014, *Modal Sosial dalam Pengembangan Pendidikan dalam Perspektif Teori dan Praktik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sri Lestari Rahayu, 2004, "Rintangan-Rintangan Pemberlakuan Ketentuan Kuota 30% Perempuan Di Legislatif Dalam UU Pemilu No. 12/2003 (Studi Di Kota Surakarta)", *jurnal Hukum Univ*, Vol. 67. No. 2,
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sugiyoni, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta CV, 2012.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, (Bandung: Alfabeta CV, 2012).

- Sundi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1987.
- Sunyato Usman *Sosiologi: Sejarah Teori dan Metodologi*, Center for Indonesia Research and Development (CIReD), Yogyakarta: 2004.
- Very Wahyudi, 2018, “Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender”, *Politea: Jurnal Politik Islam*, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea>, Vol. 1, No. 1.
- Winengan, Juli 2018, “Kebijakan Demokratisasi Politik Lokal Partisipasi Pemilu dalam Pilkada Langsung”, *jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 22, No. 1.
- Winengan, Januari 2021, “Pembinaan Sosial Masyarakat Nelayan Jaringan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat”, *Jurnal Sosiologi*, Vol. 26, No. 1, hlm 44-45

B. Internet

- Azwar Zamhuri, (15-07-2016), *Hj Baiq Isvie Rupaeda, Wanita Pertama yang Menjadi Ketua DPRD NTB*, radarLombok.co.id.diakses pada 18 Desember 2021, pukul 20.14.
- Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat (BPS NTB), dalam <https://ntb.bps.go.id/indicator/40/327/1/indeks-pemberdayaan-gender-idg-.html>, diakses 15 Desember 2021.
- Bimo Wiwoho KPU Tetapkan Jumlah Dapil Kursi Pemilu 2019, berita CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180418181605-32-291797/kpu-tetapkan-jumlah-dapil-dan-kursi-pemilu-2019>, [diakses pada 28 Februari 2022, pukul 12.02].
- Data DPRD Provinsi Terpilih 2019-NTT, <https://www.puskapol.ui.ac.id/data-dprd-provinsi-terpilih-2019-ntt>, [diakses 28 Februari 2022, pukul 11.11].
- Fitria Chusna, *Keterwakilan Perempuan di DPR 2019-2024 di Prediksi Paling Tinggi*, <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/26/10465321/keterwakilan-perempuan-di-dpr-2019-2024>, diakses pada 15 Desember 2021, pukul 23.40.

Golkar Tetapkan Baiq Isvie Rupaeda Jadi Ketua DPRD NTB, Kabar Golkar, 20-09-2019, diakses pada 18 Desember 2021, pukul 20.15.

Khaerunnisa, *Perempuan dan Politik (Studi Perbandingan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Pada Partai Golkar Dan Partai Keadilan Sejahtera Kota Makassar)*, Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), 2019, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019*, Laporan. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Peta Pencalonan Perempuan di Pemilu Serentak 2019, Dalam <https://perludem.org/2018/09/26/peta-pencalonan-perempuan-di-pemilu-serentak-2019/>, [diakses 5 Januari 2022, pukul 21.25].

UNDH, *Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintahan*, UNDH Indonesia, 2010.

Yan, *Isvie Satu-Satunya Perempuan Lolos ke DPRD NTB*, <https://radarlombok.co.id/isvie-satu-satunya-perempuanlolos-ke-dprd-ntb.html>, diakses pada 15 Desember 2021, pukul 23.44.

C. Wawancara

Wawancara dengan Hj. Misfalah, Calon anggota legislatif DPRD Provinsi yang tidak terpilih dari partai Demokrat, wawancara dilaksanakan hari minggu tanggal 03 April 2022, Kelurahan Pejeruk Kebon Bawak Tengah, pukul 10.11.

Wawancara dengan Hj.Nurlaela, Calon anggota legislatif DPRD Provinsi yang tidak terpilih dari partai PKB, wawancara dilaksanakan hari rabu tanggal 06 April 2022, Melalui Vidio Call (VC) WhatsApp, pukul 16.05.

Wawancara dengan Hj. Suryahartin, Calon anggota legislative DPRD Provinsi NTB yang tidak terpilih dari partai NasDem, wawancara dilaksanakan selasa tanggal 12 April 2022, Kantor Gerbang Emas NTB Sweta, pukul 14.45.

LAMPIRAN



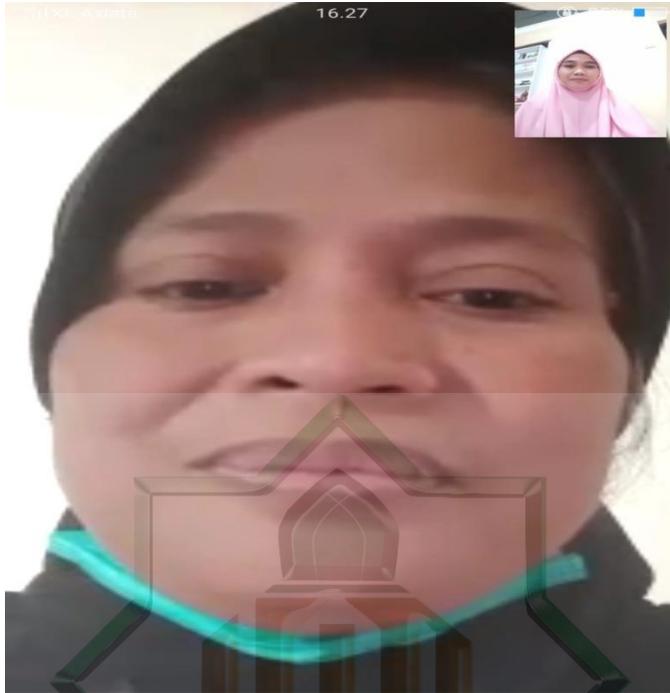
**Wawancara Bersama Hj. Misfalah Calon Anggota Legislatif
Perempuan Tidak Terpilih Pada Pemilihan Umum DPRD Provinsi
NTB Tahun 2019**



**Wawancara Bersama Hj. Suryahartin Calon Anggota Legislatif
Perempuan Tidak Terpilih Pada Pemilihan Umum DPRD Provinsi
NTB Tahun 2019**



Perpustakaan UIN Mataram



**Wawancara Bersama Hj. Nurlaela Calon Anggota Legislatif
Perempuan Tidak Terpilih Pada Pemilihan Umum DPRD Provinsi
NTB Tahun 2019**

Perpustakaan UIN Mataram

Daftar Nama anggota DPRD Provinsi NTB

	Nama	Partai	Dapil	Jabatan
1	Misbach Mulyadi	Golkar	Kota Mataram	Ketua Fraksi
2	Lalu Ahmad Ismail	Golkar	Lombok Tengah, Lombok Utara	Bendahara Fraksi
3	Umar Said	Golkar	Lombok Tengah, Lombok Utara	Wakil Ketua Fraksi
4	Baiq Isvie Rupaeda	Golkar	Lombok Timur A	Ketua DPRD Prov NTB, BAMUS, BANGGAR
5	Mau'ud Adam	Golkar	Lombok Timur B	Anggota
6	Bursah Hasan	Golkar	Sumbawa Barat, Sumbawa	Sekretaris Fraksi & Wakil Ketua BK
7	A. Hafid	Golkar	Dompu, Bima, Kota Bima	Wakil Ketua Komisi I
8	Puaddi	Golkar	Lombok Tengah A	Ketua Komisi IV
9	Lalu Satriawandi	Golkar	Lombok Tengah A	Sekretaris Komisi III
10	Lalu Akhmad Yani	Golkar	Lombok Tengah B	Anggota
11	Ridwan Hidayat	Grindra	Kota Mataram	Ketua Komisi II
12	Nauvar Furqony Parinduan	Grindra	Lombok Tengah, Lombok Utara	Ketua Fraksi
13	Sudirsah Sujanto	Grindra	Lombok Tengah, Lombok Utara	Sekretaris Fraksi
14	Machsun R.	Grindra	Lombok Timur A	Anggota
15	Haerul Warisin	Grindra	Lombok Timur B	Anggota
16	Abdul Talib	Grindra	Sumbawa Barat, Sumbawa	Anggota
17	Mori Hanafi	Grindra	Dompu, Bima, Kota Bima	Wakil Ketua DPRD, BAMUS, BANGGAR
18	Lalu Wirajaya	Grindra	Lombok Tengah A	Wakil Ketua Komisi V
19	Lalu Sudiartawan	Grindra	Lombok Tengah B	Wakil Ketua Fraksi
20	Muzihir	PPP	Kota Mataram	Wakil Ketua DPRD, BAMUS, BANGGAR

21	Muhammad Ruslan	PPP	Lombok Tengah, Lombok Utara	Wakil Ketua Komisi III
22	TGH Hazmi Hamzar	PPP	Lombok Timur A	Anggota
23	Rusli Manawari	PPP	Sumbawa Barat, Sumbawa	Wakil Ketua Fraksi
24	Syirajuddin	PPP	Dompu, Bima, Kota Bima	Ketua Komisi I
25	Moh. Akri	PPP	Lombok Tengah A	Ketua Fraksi
26	M. Adung	PPP	Lombok Tengah B	Anggota
27	TGH Achmad Muchlis	PKS	Kota Mataram	Anggota
28	TGH Satriawan	PKS	Lombok Tengah, Lombok Utara	Wakil Ketua Fraksi
29	Abdul Hadi	PKS	Lombok Timur A	Wakil Ketua DPRD, BAMUS, BANGGAR
30	Sambirang Ahmadi	PKS	Sumbawa Barat, Sumbawa	Sekretaris Fraksi & Ketua Komisi III
31	Syamsuddin Majid	PKS	Dompu, Bima, Kota Bima	Anggota
32	Yek Agil	PKS	Lombok Tengah A	Anggota
33	TGH Patompo	PKS	Lombok Tengah B	Ketua Fraksi & Sekretaris Komisi V
34	TGH Mahalli Fikri	Demokrat	Lombok Tengah, Lombok Utara	Ketua Fraksi & Ketua Komisi V
35	R. Rahadian Soejono	Demokrat	Lombok Timur B	Sekretaris Fraksi
36	Ismail	Demokrat	Sumbawa Barat, Sumbawa	Anggota
37	A. Rahmad H. Abidin	Demokrat	Dompu, Bima, Kota Bima	Wakil Ketua Fraksi
38	Abdul Rauf	Demokrat	Dompu, Bima, Kota Bima	Wakil Ketua Komisi II
39	Moh. Rais Ishak	Demokrat	Lombok Tengah A	Sekretaris Komisi I
40	Lalu Riadi	Demokrat	Lombok Tengah B	Anggota

41	Muhammad Jambur	PKB	Lombok Tengah, Lombok Utara	Wakil Ketua Fraksi
42	Abdul Wahid	PKB	Lombok Timur A	Anggota
43	Makmun	PKB	Lombok Timur B	Ketua BAPEMPERDA
44	Akhdiansyah	PKB	Dompu, Bima, Kota Bima	Sekretaris Fraksi
45	Lalu Hadrian Irfani	PKB	Lombok Tengah A	Ketua Fraksi
46	Lalu Pelita Putra	PKB	Lombok Tengah B	Sekretaris Komisi IV
47	Hasbullah Muis	PAN	Lombok Tengah, Lombok Utara	Ketua Fraksi
48	Saepuddin Zohri	PAN	Lombok Timur A	Anggota
49	Najamuddin Moestafa	PAN	Lombok Timur B	Ketua Badan Kehormatan
50	Muhammad Nasir	PAN	Sumbawa Barat, Sumbawa	Anggota
51	Ady Mahyudi	PAN	Dompu, Bima, Kota Bima	Wakil Ketua Fraksi
52	Jalaluddin	Berkarya	Lombok Timur A	Anggota
53	A. Kahar Muhamad Rifai	Berkarya	Dompu, Bima, Kota Bima	Sekretaris Fraksi
54	Multazam	NasDem	Lombok Tengah, Lombok Utara	Ketua Fraksi
55	Muhammad Khairul Rizal	NasDem	Lombok Timur A	Anggota
56	Bohari Muslim	NasDem	Lombok Timur B	Anggota
57	Asaat Abdullah	NasDem	Sumbawa Barat, Sumbawa	Wakil Ketua Fraksi & Sekretaris Komisi IV
58	Raihan Anwar	NasDem	Dompu, Bima, Kota Bima	Sekretaris Fraksi
59	Junaidi Arif	PBB	Lombok Tengah, Lombok Utara	Anggota
60	Moh. Edwin Hadiwijaya	PBB	Lombok Timur A	Sekretaris Fraksi
61	Made Slamet	PDI-P	Kota Mataram	Anggota

62	Raden Nuna Abriadi	PDI-P	Lombok Tengah, Lombok Utara	Wakil Ketua Fraksi & Wakil Ketua BAPEMPERDA
63	Lalu Budi Suryata	PDI-P	Sumbawa Barat, Sumbawa	Ketua Fraksi
64	Ruslan Turmuzi	PDI-P	Lombok Tengah B	Anggota
65	Ahmad Dahlan	Hanura	Dompu, Bima, Kota Bima	Anggota



Perpustakaan UIN Mataram

**Rekapitulasi persentase keterwakilan perempuan
dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD provinsi NTB
pada pemilihan umum 2019**

NO	URUT	PARTAI	DAPIL 1		DAPIL 2		DAPIL 3		DAPIL 4		DAPIL 5		DAPIL 6		DAPIL 7		DAPIL 8		JUMLAH			% PEREMPUAN							
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L		P	L + P					
1		PKB	8	3	2	4	8	4	3	6	3	3	2	5	3	7	4	4	3	4	2	4	0	2	3	3	36.51		
2		GERINDRA	8	3	2	4	8	4	3	6	3	3	4	2	5	3	7	4	4	3	4	2	4	1	2	4	5	36.92	
3		PDIP	8	3	2	4	6	5	4	6	3	4	2	5	3	6	5	4	3	4	3	4	2	3	8	2	6	4	40.63
4		GOLKAR	8	3	2	4	8	4	3	5	4	4	2	5	3	7	4	4	3	4	3	4	2	4	0	2	5	5	38.46
5		NASD	8	3	2	4	6	3	3	6	3	4	2	5	3	7	4	4	3	4	2	3	2	3	8	2	6	0	36.67

6	EM GARUDA	8	1	1	5 0 0	4 3 8 6	3 2	4 0 0	4 2	3 3 3	5 3	3 7 5 0	6 3	3 3 3	2 0 0	2 1	3 3 3	2 8	1 7	4 5	37.78	
7	BERKARYA	8	3	2	4 0 0	8 4 3 3	6 3	3 3 3 3	4 2	3 3 3	5 3	3 7 5 0	7 4	3 6 3 6	4 3	4 3	4 2 8 6	4 3	4 1	2 4	6 5	36.92
8	PKS	8	3	2	4 0 0	7 4 3 6	5 4	4 4 4 4	3 2	4 0 0 0	5 3	3 7 5 0	7 4	6 3 3 6	4 3	4 3	4 2 8 6	4 3	3 8	2 5	6 3	39.68
9	PERINDO	8			4 0 0	3 0 0	3 2	4 0 0	4 2	3 3 3	5 3	3 7 5 0	7 3	3 0 0 0	4 3	4 2	4 2 8 6	3 3 3	3 7	2 0	5 7	35.09
10	PPP	8			4 0 0	5 0 0	6 3	3 3 3	4 2	3 3 3	5 3	3 7 5 0	7 4	3 6 3 6	4 3	4 3	4 2 8 6	4 3	3 9	2 6	6 5	40.00
11	PSI	6			4 0 0	5 0 0	1 0	3 0 0	1 0	1 0 0	0 0	0 0 0	1 1	5 0 0 0	0 0	1 0	0 0 0	0 0 0	5	7	1 2	58.33
12	PAN	8			4 0 0	3 3 3	6 3	3 3 3	4 2	3 3	5 3	3 7 5 0	7 4	3 6 3 6	2 0	4 2	4 0 3	3 3	3 8	2 1	5 9	35.59
13	HAN	8			4 0 0	3 3 6	3 3	3 3	4 2	3 3	5 3	3 7 5 0	7 4	3 6 4 3	4 3	4 3	4 2 3	4 3	4 1	2 4	6 5	36.92

	U R A			0		3		3		3		5		3		8		8								
1 4	D E M O K R A T	8		4 0 . 0 0		5 8 . 3 3		3 7 . 5 0		3 3 . 3 3		3 7 . 5 0		3 6 . 3 6		4 2 . 8 6		4 2 . 8 6		3 7		2 7		6 4		42.19
1 9	P B B	8		4 0 . 0 0		3 . 3 3		3 . 3 3		3 . 3 3		3 7 . 5 0		3 6 . 3 3		3 . 3 3		4 0 . 0 0		4 0		2 2		6 2		35.48
2 0	P K P I	6		4 0 . 0 0		3 . 3 3		8 5 . 7 3		3 . 3 3		3 7 . 5 0		3 6 . 3 3		0 . 0 0		0 . 0 0		2 2		1 8		4 0		45.00
T O T A L		6		4 0 . 9 6 8		3 7 . 9 7 6		3 9 . 2 5 3		3 4 . 8 7 4		3 7 . 1 5 0		3 6 . 5 5 4		4 1 . 9 5 3		4 . 9 3 9		5 6 3		3 5 1		9 1 4		38.40

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Jawaban pertanyaan sesuai dengan peneliti tanyakan nantinya atau pertanyaan yang sudah disediakan, sebagai berikut.

Pasangan calon legislatif perempuan yang kalah pada pileg 2019 (X)

No	Pertanyaan
1	Bagaimana strategi anda pada pileg 2019 kemarin
2	Apakah ada hambatan dalam penerapan strategi tersebut
3	Apa tantangan terberat anda pada pileg 2019 kemarin
4	Apa saja faktor yang membuat anda kalah dalam menghadapi pasangan calon anggota lain di lapangan
5	Bagaimana upaya dalam meningkatkan keterwakilan politik perempuan di DPRD provinsi NTB

REKAP HASIL WAWANCARA

Narasumber : Hj. Suryahartin
Unsur Perwakilan : Partai Nasdem (Incumbent)
Waktu/Tempat : Selasa, 12 April 2022, Kantor Gerbang Emas
NTB Sweta, pukul 14.45.
Wawancara : Secara langsung (lapangan)

Apa yang menyebabkan ibu kalah/Apa tantangan terberat ibu pada pileg 2019 kemarin?

Pada pemilu kemarin sebenarnya saya tidak kalah tapi hanya tergeser, dan kalau berbicara tantangan sebenarnya dari eksternal itu tidak ada, saya maju periode kedua suara meningkat, dulu saya naik DPRD periode pertama 10 ribu kurang tapi kalau kemarin hampir 12 ribu, tetapi apa yang membuat saya kalah, tapi sebenarnya bukan kalah tapi tersenggol, ada pesaing yang masuk sebenarnya masuk tidaknya dia tetap salah kita untuk mendapatkan kursi, tapi itulah namanya politik. Detik-detik deadline dia masuk di partai kita dari organisasi besar otomatis dia lebih tinggi suaranya daripada kita, karena soalnya dari sisi konstituen, kalau sisi pergerakan, ikatan emosional di masyarakat itu tidak ada masalah.

Bagaimana strategi ibu pada pileg kemarin?

Kalau strategi saya melakukan pendekatan dengan masyarakat, saya naik dulu di periode pertama boleh dibilang, saya tidak pernah beli suara, yang kalau orang bilang bahwa dengan uang akan naik. Saya murni hanya pendekatan kepada masyarakat, kalau bantuan komunal secara umum bantuan kebutuhan, pendampingan, pembimbingan iya. Tetapi kalau real dengan nyata-nyata dengan uang saya tidak.

Apakah ada hambatan terhadap strategi itu?

Kalau berbicara hambatan pasti ada dalam strategi itu, namanya juga masyarakat susah-susah gampang. Apalagi dengan eskalasi politik yang sekarang saking masyarakatnya sering memilih, apa sih yang tidak dipilih? Kadus dipilih, pekasih dipilih, jangan kata bupati, gubernur, wali kota juga dipilih. Saking seringnya mereka memilih akhirnya minset mereka

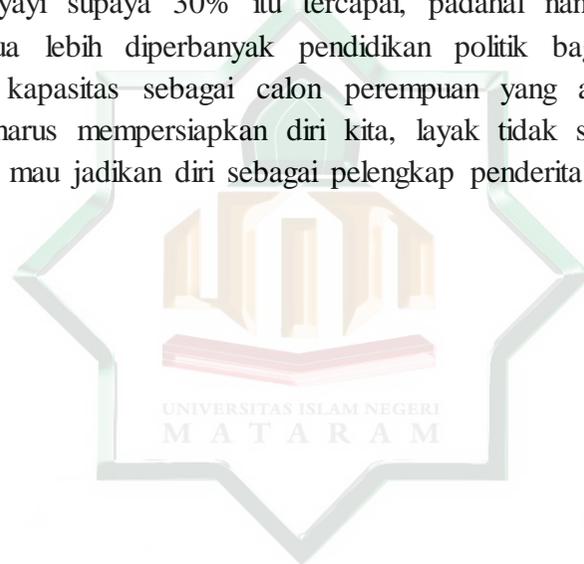
berubah, kalau dulu mungkin mereka ingin dalam hal DPR misalnya, kalau dulu mungkin awal-awalnya betul-belul yang bisa mengayomi mereka, memperjuangkan mereka, karena itu yang sesungguhnya. Lama-lama saking seringnya dan banyaknya godaan dari seringnya pentas politik ini jadi menawarkan dia juga, jadi ngapain kamu milih itu mending ini, jadi akhirnya menjadi pesta demokrasi. Artinya sekali setahun dapat bayaran dari suaranya itu karena cepat tergiur oleh materi, sehingga kepercayaan pemilih yang awalnya akan dipilih berubah jika diberikan materi dll. Seheinggakan jauh dari target yang kita dapat kalau satu lokasi walaupun dia sudah setia dengan kita, disitu kita targetkan dengan seratus suara kita dapat, empat puluh atau tiga puluh sudah syukur, karena masyarakat juga punya kebutuhan jadi semakin sulit untuk dipegang, jadi mereka seperti take in give meskipun kadang kita sudah berbuat lima tahun, dulu sebelum DPR aja sudah bisa berbuat tambah di DPR kita kan punya kuasa kan memperjuangkan mereka, memenuhi apa yang mereka inginkan sesuai dengan prodesur tentunya. Lima tahun berbuat, ujung-ujungnya kita disamakan dengan orang yang baru datang. Hitungkan saya berapa disitu saya berani bayar disana segitu, tetapi itu bukan penghambat untuk saya tidak maju lagi.

Dan sebenarnya kebanyakan perempuan itu banyak dibuat sebagai pelengkan penderita, kalau memang benar-benar diperhitungkan dan di support untuk maju berikan dia nomer yang bagus, taruhkan dia nomer satu. Kedua, wabilkhusus di NTB ini perempuan belum kompak, kan pemilih perempuan lebih banyak, jika perempuan pilih perempuan maka wakilnya di DPRD, kalau sudah penuh di DPR apa-apa maunya perempuan ini, karena semua hal baru bangun dari tidur saja kita tidak bisa menghindari dari politik, lampu kebijakan politik, naik harga listrik sudah berpengaruh pada ekonomi. Apapun semua jalan raya di desa yang paling butuh siapa? Sebenarnya perempuan, bayangkan kalau jalannya jelek minalkan apalagi ujung sana di ujung bukit belum ada jalan dia mau melahirkan tengah malam yang sampai melahirkan dijalan karena itu. Siapa juga yang banyak membutuhkan air? Perempuan, kalau laki kan kencing pakai batu karang bisa cebok sedikit bisa, kalau perempuan itu tidak bisa. Kalau nyuci dan mensucikan diri kita juga mana bisa kurang air. Nah makanya perlu sebenarnya perempuan itu diperjuangkan, tetapi

sekali lagi kita tidak kompak yang perempuan, sehingga ya kadang-kadang mungkin iri juga liat teman. Harusnya tidak begitu, kalau ada di desa yang berpotensi kita harus pilih karena kita lebih enak juga.

Bagaimana upaya dalam meningkatkan keterwakilan politik perempuan di DPRD Provinsi NTB?

Sebenarnya pertama, keseriusan semua parpol untuk mendudukkan perempuan, artinya harus betul-betul berpotensi jangan seperti yang tadi sebagai pelengkap penderita tadi, kadang-kanga nanti dia caleg-caleg yang laki membiayai supaya 30% itu tercapai, padahal nanti itu tidak ada suara. Kedua lebih diperbanyak pendidikan politik bagi pemilih, nanti peningkatan kapasitas sebagai calon perempuan yang akan maju. Kita yang maju harus mempersiapkan diri kita, layak tidak saya, kalau tidak layak jangan mau jadikan diri sebagai pelengkap penderita.



Perpustakaan UIN Mataram

Narasumber : Hj. Misfalah
Unsur Perwakilan : Partai Demokrat (Incumbent)
Waktu/Tempat : Minggu, 03 April 2022, kelurahan Pejeruk Kebon Bawak Tengah, pukul 10.11.
Wawancara : Secara langsung (lapangan)

Bagaimana strategi ibu pada pileg 2019 kemarin?

Sebenarnya strategi kita kalau dari cara kita itu. Itu sudah yang tepat menurut kita ya. Tapi dilapangan kita tidak tau seperti apa. Dan terutama di dapil kita ya yaitu dapil 6 kalau dapil 6 itu kabupaten dompu, kabupaten bima, dan kota bima, ada tiga wilayah. Sebenarnya kita sudah menguatkan strategi itu kita sudah mengatur sedemikian rupa, hingga rencana kemenangan itu akan diraih. Yang kedua dari pengalaman sebelumnya kemudian dari hasil survey, kemudian dari teman-teman itu prediksi tidak ada yang mengatakan kita akan kalah, jadi semua yang terjadi diakhir itu diluar prediksi semua orang, bahkan orang yang tidak terlibat seperti kita yang caleg, yang tidak terlibat saja memprediksikan bahwa saya akan masuk, dan ada teman itu diprediksi tidak akan lolos malah dia yang lolos terus kita yang tidak lolos. Jadi itulah strategi itu tidak akan mesti, apa yang tidak mesti itu yang membuat kita menang. Kemudian disamping itu kita perempuan, perempuan itu ruang geraknya kan terbatas itu juga yang membuat kita tidak menang, kemudian dari segi keberanian perempuan kan, bukan tidak berani kalau di adu dengan laki-laki tetap kebariannya dibawah standar. Jadi banyak faktorlah, mohon maaf bukan berani menuduh minsalkan dari segi laki-laki kan berani bohong, namanya juga politik orang semua tahu masyarakat aja yang tidak bisa baca tulis kalau orang itu, caleg-caleg itu katanya datang dengan janji kosong, kalau saya tidak berani janji. Kalau sudah mengatakan A in shaa Allah kalau besok jadi pasti akan dilakukan, tapi untuk mengumbar janji supaya dipilih itu kita tidak berani, sebagian orang kan berani, bukan berarti semua wanita itu tidak berani memberikan janji, Cuma saya sendiri pengalamannya tidak pernah memberikan janji, kadang-kadang orang mengatakan ayo apa sih kalau minsalkan menang itu akan jadi seperti apa? Saya bilang, ya pilih dulu nanti setelah menang liat saja, saya kan sudah punya pengalaman sebelumnya karena sebelumnya itu menurut saya dari aspirasi masyarakat

sudah saya penuhi semua, tapi pertempuran priode kedua itu ternyata apa yang kita lakukan tidak di ingat, bukan tidak diingat entah sengaja mereka melupakan atau mengabaikan jadi tidak ada gunanya sama sekali apa yang kita lakukan sebelumnya. Sehingga disitu juga berat sih untuk kita.

Faktor apa yang menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi NTB?

Pertama, seharusnya ya undang-undang tidak hanya mengatur pada pemenuhan caleg saja, kan caleg itu pemenuhannya 30% tapi pada saat perhitungan suara pembagian kursi di DPR itu tidak begitu, andaikan minsalkan undang-undang itu mengatur 30% keterwakilan dipencalegkan kemudian di dewan juga disiapkan 30% kursi itu, in shaa Allah perempuan akan diadu dengan perempuan, mungkin perempuan dengan sama-sama perempuan dihitung, tapi kan disitu nanti perempuan dan laki akan dirangkin bersama suaranya, andaikan dirangkin berbeda kan mungkin perempuan akan memenuhi keterwakilan 30% itu tapi nyatanya kan tidak begitu. Jadi undang-undang mengaturnya sampai di caleg saja tidak dikursi dewannya. Kedua kalau kita diadu dengan laki-laki tentu berbeda, contoh kekuatan laki-laki dua kali dari kekuatan perempuan. Kemudian yang berikutnya ruang gerak perempuan di batasi, bukan undang-undang yang membatasi tapi kan didalam agama kita, kita menganut agama islam, jadi kita berbarur dengan laki-laki kan dibatasi sementara laki-laki itu sejak mereka lahir sudah diperkenalkan dengan alam yang luas, dengan dunia luas. Tapi kalau perempuan kan begitu lahir diperkenalkan dengan seisi rumah, jadi itu keterbatasannya. Jadi ketika kita minsalkan laki-laki bisa duduk dengan sesame laki sampai jauh malam bisa keluar, dan kemudian yang biasa berkecimpung dipolitik ini kan kebanyakan laki-laki. Kalau kita berbaur juga dengan laki-laki disitu kan agak risih juga, jadi itu ruang geraknya terbatas disitu, kalau menurut saya. Ekonomi juga membuat perempuan lemah dalam aspek yang lain, termasuk kemandirian dalam mengambil keputusan, akses sosial, politik dan kesempatan untuk mengembangkan diri.

Bagaimana upaya dalam meningkatkan keterwakilan politik perempuan di DPRD Provinsi NTB

Kalau menurut saya rubah aturan tadi, 30% itu mulai pencalegkan sampai ke kursi legislatifnya. Kalau seperti ini terus yang dilakukan maka seperti inilah yang terjadi diketerwakilan di DPRD itu tentu pasti kurang, selalu akan kurang. Yang dulu saja seharusnya dari 65 itu 30% sebenarnya 11 orang, namun yang kemarin saja kita hanya 6 orang periode yang lalu itu tidak terpenuhi tapi sudah sangat luar biasa orang-orang juga bilang wah luar biasa periode ini perempuannya banyak, nah sekarang ini hanya ibu Isvie yang naik kita semua tergusur, disamping itu kan aturannya undang-undang itu kan melarang mony politik, tetapi buktinya semua orang melakukan itu, jadi keterbatasannya juga kita disitu. Tergantung keberani juga, jadi kalau perempuan itu ruang gerak perempuan itu terbatas, keberanian untuk menghalalkan segala macam cara itu juga terbatas karena mungkin tidak terbiasa, karena kita kan biasa di didik didalam lingkup yang kecil tidak terlalu diberi kebebasan untuk berbaur dengan yang lebih luas, sehingga juga mungkin itu kendala kita. Dan dari segi materi juga, tapi mungkin semua oranglah baik laki maupun perempuan, jadi kekalahan dari kendala segi materi itu baik laki maupun perempuan sama, siapa yang kaya dia dapat. Contoh kita yang di dapil 6 yang dipartai saya, yang di partai saya yang dapat suara terbanyak sekarang kan H. Mail yang mantan Wali Kota Bima. Jadi sebelum kita lahir orang ini sudah kaya dari dulu, jadi kita yang rakyat biasa harus melawan mereka ya berat, tapi itu tadi karena kita modal keberanian untuk beradu dengan laki, kalau dapet ya Alhamdulillah dan kemudian yang kemarin ada pergeseran dikit. Jadi sebenarnya kita dengan caleg-caleg yang kemarin membagi sembako minsalkan karena saya dapat dari aspirasi kan, jadi aspirasi saya yang saya bagikan. Itu ketika yang kata orang serangan fajar itu ketika hari H itu, mereka sudah jalan dengan uangnya. Jadi pemilih kita yang sebelumnya yang menyatakan pastilah kalau ibu tidak ada yang begini sebelumnya, anggota DPRD yang pernah seperti itu tidak ada yang seperti itu. Sebenarnya bukan percaya atau gimana ya, tapi orang yang ngomong ini adalah orang yang pernah kita bantu juga, tapi buktinya setelah malam hari H itu semua berubah.

Narasumber : Hj. Nurlaela
Unsur Perwakilan : Partai PKB (Religius)
Waktu/Tempat : Rabu, tanggal 06 April 2022, Melalui Vidio Call (VC) WhatsApp, pukul 16.05.
Wawancara : Melalui virtual (Vidio Call WhatsApp)

Bagaimana strategi ibu pada pileg 2019 kemarin?

Strategi saya hanya melakukan pendekatan kepada masyarakat, tapi karena suara teman saya saja yang lebih banyak. Karena sistem saya sama saja dengan sistem yang kemarin 2014 makanya keablasan yang kemarin.

Apakah ada hambatan dari strategi itu/yang menyebabkan ibu kalah pada pileg 2019 kemarin?

Sebenarnya kita tidak kalah tapi tergeser, dan sebenarnya tidak ada hambatan, tapi saya kan tinggal di Mataram. Jadi saya tidak terlalu dikenal gitu. Karena gini, kami wanita itu berjuangnya seperti saya, Umi Tien dan Hj. Misfalah kalau berjuang itu memang seperti laki-laki yang kalau laki-laki lari pudar ya kami lari pudar. Kita ini orang gila karena kenapa?, kami perempuan, kami harus menang, tapi kan pandangan orang-orang masyarakat apa sih bisanya perempuan itu, pandangan masyarakat masih saja sering menganggap perempuan remeh atau sebelah mata. Tapi kami saya pribadi buktikan ini program saya. Sampai detik ini saya ini banyak penyesalan kepada pemilihlah minsalnya dibandingkan dengan perempuan, karena perempuan itu kalau sudah bilang A maka A begitu, tapi perempuan paling takut kadang-kadang untuk berjuang, tapi kalau saya pribadi akan berjuang nanti periode 2024, termasuk ibu Misfalah akan berjuang lagi katanya.

Bagaimana upaya dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi NTB?

Kalau laki-laki satu kilo ya perempuan tidak boleh satu kilo ya harus lima kiloan, minsalkan contohnya. Strategi semuanya punya strategi, yang paling pintar itu semuanya, jadi strategi kita ya harus

lebih dari laki-laki kalau dia mau menang, karena yang masuk di dewan itu bukan masalah laki-laki ataupun perempuan tapi mereka punya strategi untuk memenangkan pemilu. Siapapun pemenangnya mesti ada nama partai disitu.



Perpustakaan UIN Mataram



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Jalan Pendidikan Nomor 2 Tlp. (0370) 7505330 Fax. (0370) 7505330
Email bakesbangpoldagri@ntbprov.go.id Website <http://bakesbangpoldagri.ntbprov.go.id>
MATARAM

kode pos 83125

REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR : 070 / 517 / III / R / BKBDN / 2022

1. **Dasar**
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian Surat Dari Dekan Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram
Nomor : 40/Un.12/FUSA/SKM-IP/PP.00.9/03/2022
Tanggal : 24 Maret 2022
Perihal : Izin Penelitian
 2. **Menimbang** :
Setelah mempelajari Proposal Survei/Rencana Kegiatan Penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :
Nama : HAIRURRAYAN
Alamat : Lingsar Timur RT/RW 002 / 002 Kel/Desa. Lingsar Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat No Identitas 5201126401000002 No Tlpn 087866162085
Pekerjaan : Mahasiswa Jurusan Pemikiran Politik Islam
Bidang/Judul : **PROBLEMATIKA RENDAHNYA KETERWAKILAN POLITIK PREMPUAN (Studi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat)**
Lokasi : Partai PKB Hj Nurfaela, Partai Nasdem Hj. Suryahartin, Partai Demokrat Hj. Misfalah
Jumlah Peserta : 1 (Satu) Orang
Lamanya : April - Mei 2022
Status Penelitian : Baru
 3. **Hal-hal yang harus ditaati oleh Peneliti** :
 - a. Sebelum melakukan Kegiatan Penelitian agar melaporkan kedatangan Kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. Penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan judul beserta data dan berkas pada Surat Permohonan dan apabila melanggar ketentuan, maka Rekomendasi Penelitian akan dicabut sementara dan menghentikan segala kegiatan penelitian;
 - c. Peneliti harus mentaati ketentuan Perundang-Undangan, norma-norma dan adat istiadat yang berlaku dan penelitian yang dilakukan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi Bangsa atau keutuhan NKRI Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian telah berakhir, sedangkan pelaksanaan Kegiatan Penelitian tersebut belum selesai maka Peneliti harus mengajukan perpanjangan Rekomendasi Penelitian;
 - d. Melaporkan hasil Kegiatan Penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Demikian Surat Rekomendasi Penelitian ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 29 Maret 2022
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB
Kebid. Wasnas dan PK



PEBRIANDY UDJUJEDA, S.Sos
NIP. 19730209 199402 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Daerah Provinsi NTB di Mataram;
2. Walikota Mataram Cq. Ka. Kesbangpol Kota Mataram di Tempat;
3. Hj. Nurfaela Dari Partai PKB di Tempat;
4. Hj. Suryahartin dari Partai Nasdem di Tempat;
5. Hj. Misfalah dari Partai Demokrat di Tempat



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Bypass ZAMIA 2 - Desa Lelede - Kecamatan Kediri - kode pos 83362
Kabupaten Lombok Barat - Provinsi NTB, E-mail: brida@ntbprov.go.id Website: brida.ntbprov.go.id

SURAT IZIN
Nomor : 070 / 1129 / II – BRIDA / III / 2022
TENTANG
PENELITIAN

- Dasar : a. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas perda No 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB.
b. Peraturan Gubernur NTB Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Nomor :40/Un.12/FUSA/SKM-IP/PP.00.9/03/2022 Perihal:Permohonan Izin Penelitian. .

MEMBERI IZIN

Kepada :
Nama : HAIRURRAYAN
NIP/NIM : 180603032
Instansi : Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram
Alamat/HP : Desa.Lingsar Kab.Lombok Barat 087866162085
Untuk : Melakukan Penelitian dengan Judul:
"PROBLEMATIKA RENDAHNYA KETERWAKILAN POLITIK PREMPUAN (Studi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat)"
Lokasi : Partai PKB Hj Nurlaela, Partai Nasdem Hj.Suryahartin, Partai Demokrat Hj.Misfalah
Waktu : April-Mei 2022

Dengan ketentuan agar yang bersangkutan menyerahkan hasil penelitian selambat lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai melakukan penelitian kepada Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi NTB via email: litbang.bridaprovntb@gmail.com

Demikian surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Lombok Barat
Pada tanggal. 28 Maret 2022
an. KEPALA BRIDA PROV. NTB
SEKERTARIS BRIDA PROVINSI NTB



REINING UNTARI S. Si., M.Kes
NIP. 19720210 199703 2 005

- Tembusan: disampaikan kepada Yth.
1. Gubernur NTB (Sebagai Laporan);
2. Walikota Mataram;
3. Hj Nurlaela Dan Partai PKB ;
4. Hj. Suryahartin dan Partai Nasdem ;
5. Hj Misfalah dan Partai Demokrat ;
6. Yang Bersangkutan,
7. Arsip

Perpustakaan UIN MATARAM



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
UPT PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298-625337-634490 Fax. (0370) 625337
Mataram – Nusa Tenggara Barat

**SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM
NO. 366/M.03.02/2022**

Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram menerangkan
bahwa :

NAMA : HAIRURRAYYAN
NIM : 180603032
FAK/JUR : FUSA/PPI

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan,
sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan
Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Surat keterangan ini diberikan untuk keperluan
daftar ujian skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 12 Mei 2022
An. Kepala Perpustakaan,



SUAEB, S. Adm.
NIP.196812312003121004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298-625337-634490 Fax. (0370) 625337

SURAT KETERANGAN

No. :1020 Un.12/Perpustakaan/05/2022

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hairurrayan
Nim : 180603032
Jurusan : PPI
Fakultas : FUSA

Telah melakukan pengecekan tingkat similiarity dengan menggunakan software Turnitin plagiarism checker. Hasil pengecekan menunjukkan tingkat similart 15% Skripsi yang bersangkutan dinyatakan layak untuk **diuji**.

Demikian surat keterangan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Mataram, 12 Mei 2022

A. Kepala UPT Perpustakaan



Nuraeni, S.IPI

NIP. 197706182005012003



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Hairurrayan 18.0.60.3.032
Assignment title: Pemikiran Politik Islam
Submission title: PROBLEMATIKA RENDAHNYA KETERWAKILAN POLITIK PEREM...
File name: SKRIPSI_Hairurrayan_180603032_PPI_VIIB.docx
File size: 394.54K
Page count: 56
Word count: 8,837
Character count: 56,392
Submission date: 10-May-2022 02:28PM (UTC+0800)
Submission ID: 1832776580



PROBLEMATIKA RENDAHNYA KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

id.wikipedia.org

Internet Source

6%

2

jurmafis.untan.ac.id

Internet Source

4%

3

dewey.petra.ac.id

Internet Source

3%

4

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

2%

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

Perpustakaan UIN Mataram